



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 6718/MPK.A/PR.04.03/2023

28 Februari 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022

Yth.

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jakarta

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

Komplek Kemendikbudristek
Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

Telp.
(021) 5731177



LAPORAN KINERJA

2022

 [fb.com/kemdikbud.ri](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)

 [instagram.com/kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)

 twitter.com/Kemdikbud_RI

 KEMENDIKBUD RI

 www.kemdikbud.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT), Kemendikbudristek menetapkan 5 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang dilaksanakan oleh 9 Unit Organisasi Eselon I dan 364 Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022.

Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kemendikbudristek serta menetapkan rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2022.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2022.

Jakarta, Februari 2023
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim



Daftar Isi



i
ii
iii
x
xiv
xv

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Ikhtisar Eksekutif
Permasalahan Umum
Langkah Antisipasi



BAB I Pendahuluan

Latar Belakang 2
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi 4
Struktur Organisasi 5
Isu Strategis 6
Peran Strategis 7



9
10
12
13
14

BAB II Perencanaan Kinerja

Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2022
Alokasi Anggaran 2022
Program Prioritas



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kebijakan 18
Pengukuran Kinerja 19
Capaian Kinerja 20
Realisasi Anggaran 93
Efisiensi Anggaran 94
Inovasi 95
Penghargaan 100
Collaborative dan Crosscutting Program 102



107
108

BAB IV Penutup

Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja ke Depan



Lampiran

Pernyataan Telah Direviu 110
Perjanjian Kinerja 2022 (Awal) 111
Perjanjian Kinerja 2022 (Revisi) 115
Pengukuran Kinerja 2022 119



Daftar Singkatan

#

3T Tertinggal, Terluar, Terdepan/Daerah Perbatasan

A

ADik	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AKM	Asesmen Kompetensi Minimum
AKS	Angka Kesiapan Sekolah
AN	Asesmen Nasional
ANBK	Asesmen Nasional Berbasis Komputer
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ARKAS	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

B

BA	Bustanul Athfal
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi
BBPMP	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
BBPPMPV	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BIA	Bina Iman Anak
BIPA	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
BKB	Bina Keluarga Balita
BKHM	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
BMN	Barang Milik Negara
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPMP	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPP Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
BBPPMPV	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BPS	Badan Pusat Statistik



BPTI Balai Pengembangan Talenta Indonesia

C

CaLK Catatan atas Laporan Keuangan

CDIs *Culture Development Indicators*

Covid *Coronavirus Disease*

D

DAK Dana Alokasi Khusus

Dapodik Data Pokok Pendidikan

Ditjen Direktorat Jenderal

DUDI Dunia Usaha dan Dunia Industri

E

EMIS *Education Management Information System*

G

GSMS Gerakan Seniman Masuk Sekolah

GTK Guru dan Tenaga Kependidikan

I

IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis

IKU Indikator Kinerja Utama

IT *Information Technology*

IPK Indeks Pembangunan Kebudayaan

K

K/L Kementerian atau Lembaga

Kemendikbudristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KemenPAN-RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KIP Kartu Indonesia Pintar

KKG Kelompok Kerja Guru

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi



L

LKE	Lembar Kerja Evaluasi
LLDiikti	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

M

MA	Madrasah Aliyah
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTS	Madrasah Tsanawiyah

N

NIK	Nomor Induk Kependudukan
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional

O

OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
-------------	---

P

PAK	Pelayanan Anak Agama Kristen
PAUD Dikdasmen	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
PAUD-HI	Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PDBK	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
PermenPAN-RB	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	Peraturan Presiden
PHLN	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PIP	Program Indonesia Pintar
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
PK	Perjanjian Kinerja
PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru



PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPZI	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNF	Pendidikan Non Formal
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POS	Prosedur Operasional Standar
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Puslapdik	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Pusaka	Pekan untuk Sahabat Karakter
Pusmendik	Pusat Asesmen Pendidikan
Puspresnas	Pusat Prestasi Nasional

R

RA	Raudatul Athfal
RBI	Reformasi Birokrasi Internal
Renstra	Rencana Strategis
RKB	Ruang Kelas Baru
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBMPTN	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBSN	Surat Berharga Syariah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
Sertikom	Sertifikasi Kompetensi
SIPLah	Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
SKM	Survey Kepuasan Masyarakat



SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SS	Sasaran Strategis
SSS	<i>Stakeholders Satisfaction Survey</i>

T

TAAM	Taman Asuh Anak Muslim
TK	Taman Kanak-Kanak
TKQ	Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri

U

UAPPA	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I
UKBI	Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia
UKBI	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
UKT	Uang Kuliah Tunggal
ULT	Unit Layanan Terpadu
UMP	Upah Minimum Provinsi

W

WBTB	Warisan Budaya Tak Benda
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Z

ZI-WBK/WBBM	Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
--------------------	--



Capaian Kinerja 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ikhtisar Eksekutif



Rata-Rata Capaian Kinerja

112,91%

Rata-rata dari capaian **20 IKSS** yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2022

11 IKSS

Capaian **>100%**

2 IKSS

Capaian **=100%**

7 IKSS

Capaian **<100%**

Kinerja Anggaran 2022

Pagu Anggaran

Rp84.924.104.680.000

Realisasi Anggaran

Rp81.151.480.775.799



Sumber Data: Laporan Kinerja Unit Eselon I, 2022



SS 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

Angka Kesiapan Sekolah

98,62% Target **75,38**
Realisasi **74,34**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

99,80% Target **99,30**
Realisasi **99,10**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

99,77% Target **96,14**
Realisasi **95,92**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

96,72% Target **88,39**
Realisasi **85,49**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

98,86% Target **31,52**
Realisasi **31,16**

SS 2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD

103,92% Target **0,51**
Realisasi **0,53**

Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi)

125,24% Target **47,50**
Realisasi **59,49**

Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum (Numerasi)

159,86% Target **28,30**
Realisasi **45,24**

Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

100,07% Target **27,50**
Realisasi **27,52**





Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

106,50% Target **47,84**
Realisasi **50,95**

Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya

152% Target **5**
Realisasi **7,60**

Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan Dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP

105,73% Target **42,77**
Realisasi **45,22**

Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1,2x UMP)

182,18% Target **19,70**
Realisasi **35,89**

SS 3

Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

117,42% Target **69**
Realisasi **81,02**

Indeks Pembangunan Kebudayaan

86,92% Target **59,71**
Realisasi **51,90**

SS 4

Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi Terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan

Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

124,84% Target **82.500**
Realisasi **102.993**



SS 5

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek

100% Target **WTP**
Realisasi **WTP**

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek

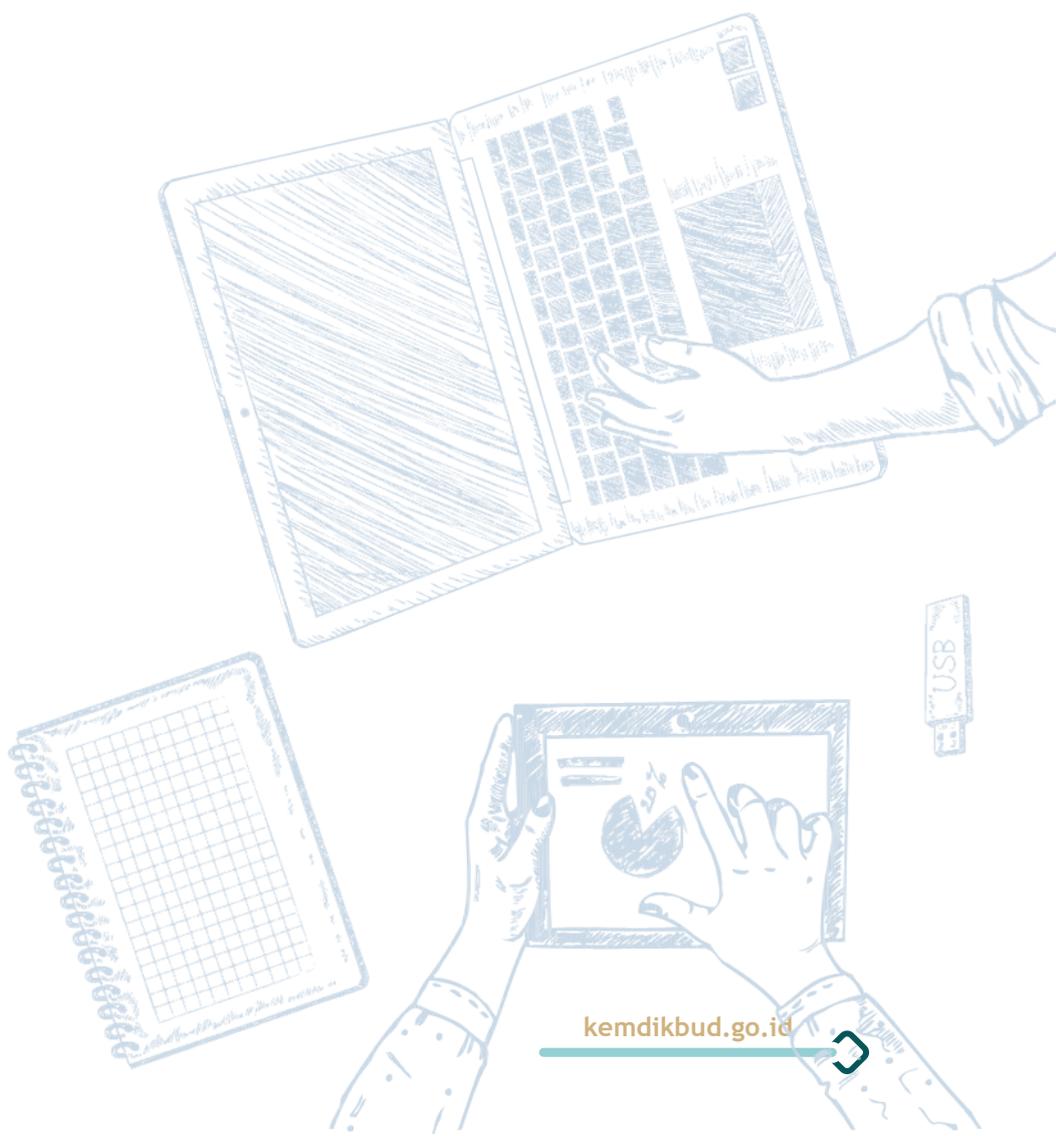
104,76% Target **82**
Realisasi **85,90**

Predikat SAKIP Kemendikbudristek

100% Target **BB**
Realisasi **BB**

Indeks Reformasi Birokrasi

94,93% Target **83**
Realisasi **78,79**



Permasalahan Umum

- 1** Belum optimalnya pencapaian beberapa target kinerja yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan karena pemulihan pascapandemi masih berlangsung dan membutuhkan penyesuaian dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2** Belum optimalnya angka partisipasi pendidikan khususnya jenjang PAUD, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi;
- 3** Belum meratanya kompetensi pendidik dalam mendukung perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di seluruh Indonesia;
- 4** Asesmen Nasional belum dapat dilaksanakan di beberapa satuan pendidikan karena kendala teknis seperti infrastruktur dan bencana alam;
- 5** Keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- 6** Adanya keterbatasan untuk mengakses produk-produk kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia, masih kurangnya sikap positif masyarakat dengan bahasa negaranya, masih kurangnya kesadaran untuk melestarikan bahasa daerah, belum maksimalnya kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk menguatkan peran bahasa Indonesia di kancah internasional;
- 7** Belum optimalnya perlindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, dan kearifan lokal; dan
- 8** Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi baik di internal Kemendikbudristek maupun antar kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan penyesuaian pada proses pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19, melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran sesuai kebutuhan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 2 Mendorong kerja sama dan kolaborasi secara berkesinambungan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan khususnya jenjang PAUD, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi, serta optimalisasi bantuan pendidikan bagi masyarakat dari kelompok kurang mampu;
- 3 Mengoptimalkan pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendidik dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua balai di seluruh Indonesia, serta optimalisasi pemanfaatan *platform* Merdeka Mengajar sebagai media berbagi untuk tenaga pendidik di seluruh Indonesia;
- 4 Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk mengoptimalkan ketersediaan sarana, prasarana, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan yang membutuhkan;
- 5 Mengoptimalkan kerja sama Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah, industri dan partisipasi swasta untuk memperbaiki infrastruktur, bantuan sarana prasarana dan SDM terutama di daerah 3T;
- 6 Menyediakan bahan bacaan literasi dan numerasi ke daerah 3T serta menyediakan laman buku digital, melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman Trigatra Bangun Bahasa: Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing, dengan melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, mendorong penguatan regulasi pelestarian bahasa daerah, dan pelibatan berbagai pihak untuk pembentukan lembaga BIPA di luar negeri;
- 7 Meningkatkan ketahanan budaya dalam upaya meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; dan
- 8 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarunit di Kemendikbudristek, antar kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB I

Pendahuluan



Latar Belakang
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis

Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan karena memasuki fase pemulihan untuk mengatasi *learning loss* akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran tersebut, antara lain melalui implementasi kurikulum pada situasi khusus (kurikulum darurat). Selain itu, Kemendikbudristek juga menerbitkan Kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, sebagai alternatif bagi satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter satuan pendidikan tersebut. Kemendikbudristek juga mendorong digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan berbagai *platform* pendidikan, salah satunya, *Platform* Merdeka Mengajar, sebagai sarana pendukung untuk membantu dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, *Platform* Rapor Pendidikan juga dikembangkan agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kinerja satuan pendidikan, memahami akar masalah, melakukan refleksi, dan kemudian menyusun perencanaan dan strategi pembenahan yang lebih baik dan berbasis pada data.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2022, Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek mengacu pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP tersebut, yakni mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tahun 2022 dalam pembangunan SDM, Kemendikbudristek terus berupaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran terus dilakukan dalam mengurangi dampak dari hilangnya pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

Dukungan Kemendikbudristek terhadap pembangunan SDM tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi memajukannya dengan cara mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan



sebagaimana visi Kebudayaan Indonesia 2020-2040 hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yakni “Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan”.

Pada tahun 2022, Kemendikbudristek melakukan penyesuaian Renstra mengikuti perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja, serta melakukan penajaman terhadap indikator kinerja agar lebih adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Kemendikbudristek terus berinovasi dan berupaya agar sistem pendidikan dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan visi Kemendikbudristek, yaitu menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dengan semangat Merdeka Belajar yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek senantiasa berikhtiar membawa perubahan terhadap pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan SDM unggul yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global untuk memajukan Indonesia. Semangat Merdeka Belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2022 ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yakni menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berlandaskan asas akuntabilitas.



Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021

tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

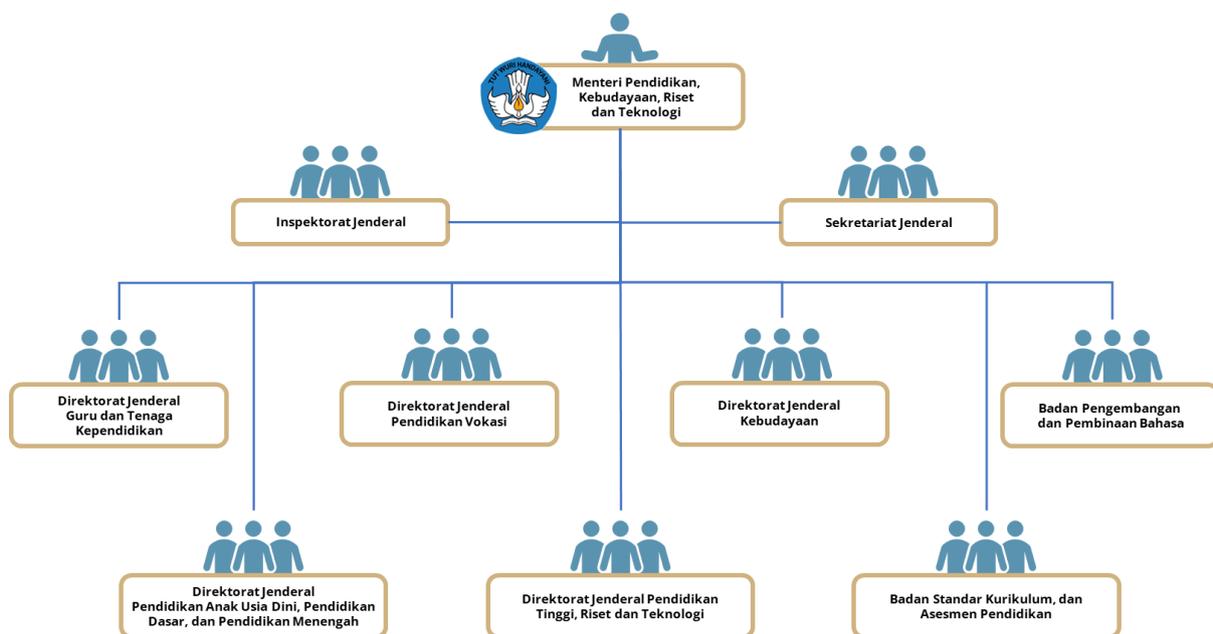
- 1 Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- 2 Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- 4 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- 5 Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- 6 Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- 7 Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- 8 Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- 9 Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- 10 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- 11 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- 12 Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 13 Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- 14 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- 15 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- 16 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- 17 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- 18 Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.



Struktur Organisasi



Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden tersebut dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kemendikbudristek menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



9

Unit Organisasi
Eselon I



Total Pegawai Kemendikbudristek
per 15 Desember 2022

124.049 orang



364

UPT

Isu Strategis

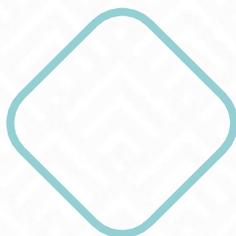
- 1 Optimalisasi angka partisipasi pendidikan, khususnya jenjang PAUD, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, serta optimalisasi bantuan pendidikan khususnya bagi masyarakat dari golongan kurang mampu;
- 2 Optimalisasi pemanfaatan hasil Asesmen Nasional oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif;
- 3 Optimalisasi relevansi serta keterserapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 4 Optimalisasi dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran serta dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas serta dapat diterapkan oleh masyarakat;
- 5 Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pembelajaran di seluruh jenjang untuk mendukung pembelajaran dalam masa pemulihan pascapandemi, serta ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi dan informasi utamanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia;
- 6 Optimalisasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas, melakukan revitalisasi bahasa daerah untuk melestarikan bahasa daerah terutama bahasa daerah yang terancam punah, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia di tingkat regional dan global;
- 7 Optimalisasi perlindungan dan pengembangan budaya serta tradisi sejarah dan kearifan lokal; dan
- 8 Koordinasi dan kolaborasi secara berjenjang, selaras dan berkesinambungan baik di internal Kemendikbudristek maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, swasta dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peran Strategis

- 1 Menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila;
- 2 Mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik yang berkeadilan dan bersifat inklusif;
- 3 Mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pengembangan kompetensi peserta didik, serta didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai;
- 4 Mendorong peningkatan produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi untuk mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat;
- 5 Mendorong pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra, serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan
- 6 Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB II

Perencanaan Kinerja



Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2022
Alokasi Anggaran 2022
Program Prioritas 2022

Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi



Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;



Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan Strategis

- 1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- 2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
- 3 Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
- 4 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
- 5 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Matriks Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020-2024

Untuk mendukung prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan 5 SS dan 20 IKSS yang merupakan IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbudristek tahun 2020-2024 (revisi tahun 2022). Sasaran dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020*	2021*	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang						
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	-	-	75,38	75,59	75,79
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	-	-	99,30	99,32	99,34
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	-	-	96,14	96,34	96,55
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,19	88,39	88,39	92,80	95
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47	34,56	31,52	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang						
IKSS 2.1	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	Nilai	-	-	0,51	0,52	0,53
IKSS 2.2	Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum						
	a. Literasi	%	-	-	47,50	49,75	52
	b. Numerasi	%	-	-	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	%	-	-	27,50	30	32,50
IKSS 2.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	47,10	48,30	47,84	48,83	49,83
IKSS 2.5	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	%	-	-	5	5,50	6
IKSS 2.6	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan	%	-	-	42,77	45	47,77

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020*	2021*	2022	2023	2024
	Pekerjaan/Berwirausaha Dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP						
IKSS 2.7	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	%	-	-	19,70	20	20,50
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	-	-	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,50	57,30	59,71	61,20	62,70
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan						
IKSS 4.1	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	Karya	-	-	82.500	86.500	90.500
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel						
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	-	-	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	81	83	85	87

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian periode 2020-2024, serta prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam RKP Tahun 2022, Kemendikbudristek merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek tidak melakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja, sehingga indikator dan target yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan. Penyesuaian dilakukan pada alokasi anggaran karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk mendukung penanganan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan mendukung pencapaian target-target prioritas nasional, antara lain digitalisasi pendidikan, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Secara umum, penambahan alokasi anggaran hampir di seluruh program prioritas nasional yang didukung oleh Kemendikbudristek, yakni Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Program Pendidikan Tinggi, Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, dan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Penyesuaian ini mengakibatkan penurunan anggaran pada Program Dukungan Manajemen untuk mengoptimalkan dukungan terhadap program prioritas nasional.

Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	1 Angka Kesiapan Sekolah	%	75,38
		2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	99,30
		3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	96,14
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39
		5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	31,52
2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	1 Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	Nilai	0,51
		2 Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum		
		a. Literasi	%	47,50
		b. Numerasi	%	28,30
3 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	%	27,50		
4 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	47,84		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	
		5	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	%	5
		6	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	%	42,77
		7	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	%	19,70
3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	69
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,71
4	Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi Terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	1	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	Karya	82.500
5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP
		2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	82
		3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB
		4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	83

Alokasi Anggaran 2022

No	Nama Program	Alokasi (Awal)	Alokasi (Revisi)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp3.061.582.460.000	Rp4.489.599.912.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp10.139.195.732.000	Rp11.660.758.958.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp28.646.007.592.000	Rp36.058.885.564.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp705.222.791.000	Rp1.238.641.749.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp19.003.441.979.000	Rp18.885.204.697.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp11.439.457.777.000	Rp12.591.013.800.000
TOTAL		Rp72.994.908.331.000	Rp84.924.104.680.000

Program Prioritas Kemendikbudristek 2022

Untuk mendukung capaian kinerja bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek melaksanakan berbagai program prioritas pada tahun 2022 sebagai berikut:

1 Pembiayaan Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Program Indonesia Pintar	Orang	17.927.992	9.662.333
2	Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah	Orang	780.014	10.003.579
3	Tunjangan Guru dan Kepala Sekolah non-PNS (TPG, TKG, dan Insentif Guru)	Orang	355.500	8.051.968
4	Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Orang	8.402	152.179
5	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	3.048	110.654

2 Digitalisasi Pendidikan, Penguatan Karakter dan Peningkatan Prestasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Bantuan Peralatan Pendidikan	Paket	17.250	1.567.647
2	Layanan Penguatan Karakter	Layanan	11	43.899
3	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya	Siswa	291	46.485
4	Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar	Sistem Informasi	3	329.529

3 Program Pendidikan Tinggi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi PHLN	Paket	12	610.705
2	Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun PHLN	Unit	27	976.064
3	SDM Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya PHLN	Orang	1.049	80.198
4	Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi SBSN	Paket	17	279.010
5	Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun SBSN	Unit	24	1.132.802
6	Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	Orang	2.500	20.000
7	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	Orang	3.075	15.000
8	Peningkatan Kualitas Kelembagaan LPTK Revitalisasi LPTK	Lembaga	6	12.899
9	Perguruan Tinggi Program Studi yang Diakreditasi BAN-PT	Lembaga	2.400	53.720
10	SDM Pendidikan Tinggi yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Orang	2.955	216.077
11	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital	Lembaga	115	2.897
12	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Mahasiswa	396	40.105



4 Program Pendidikan Vokasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	SMK Pusat Keunggulan	Lembaga	1.370	1.443.591
2	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	100	8.084
3	Mahasiswa PT Vokasi Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	7.500	12.478
4	PT Vokasi Mendukung Kebutuhan Industri	Lembaga	80	78.953
5	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	Orang	7.687	140.934
6	Program Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	30.000	131.486
7	Sertifikasi Siswa SMK	Orang	45.000	23.984
8	DUDI Kerja Sama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Kesepakatan	200	18.380
9	Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	19.896	124.472

5 Program Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Guru dan Kepala Sekolah yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	15.383	261.372
2	Guru yang Mengikuti Sertifikasi Guru	Orang	116.656	930.789
3	GTK yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	5.049	9.448
4	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Provinsi	68	220.851
5	Fasilitator dan Pendamping PGP yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	19.710	89.466

6 Program Pemajuan Kebudayaan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Even Nilai Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kegiatan	116	17.587
2	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	8.348	286.666
3	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Cagar Budaya, dan Galeri Nasional	Orang	545.635	58.661
4	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi	Orang	520	1.750
5	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	460	1.500
6	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa	100	22.000
7	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Layanan	41	113.921
8	Warisan Budaya yang Dilindungi dan Ditetapkan	Layanan	254	28.648

7 Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	14.248	29.156
2	Penutur Bahasa Terbina	Orang	8.641	10.391
3	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	250	13.982
4	Penutur Bahasa Teruji	Orang	83.441	5.740
5	Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Orang	3.742	19.979

8 Kurikulum, Perbukuan, dan Asesmen Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Buku Umum dan Buku Pendidikan yang Dikembangkan Dinilai dan Diawasi	Model	2.600	39.277
2	SDM Perbukuan yang Tersertifikasi	Orang	112	2.596
3	Kurikulum yang Dikembangkan	Model	238	22.017
4	Perangkat Pembelajaran yang Dikembangkan	Model	492	19.232
5	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	285.663	77.479
6	Rapor Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi	3	5.244
7	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Lembaga	50.000	84.748
8	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Lembaga	35.000	150.607

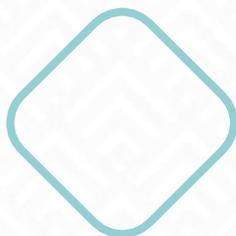
9 Program PAUD, Dikdas, dan Dikmen

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Alokasi (Dalam Juta)
1	Orang Dewasa Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	33.000	26.366
2	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000	21.055
3	Satuan Pendidikan Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	514	5.063
4	Satuan Dikdas dan Dikmen Difasilitasi Penjaminan Mutunya	Lembaga	8.603	287.531
5	Satuan Pendidikan Mendapatkan Pembinaan Asesmen Nasional	Lembaga	4.192	47.975
6	Satuan Pendidikan Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	2.896	36.592
7	Sekolah Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	6.375	91.427
8	Sekolah yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	514	4.320
9	Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	3.854	82.992



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kebijakan
Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Efisiensi Anggaran
Inovasi
Penghargaan
Collaborative dan Crosscutting Program

A. Capaian Kebijakan di Masa Pemulihan Pascapandemi

Dalam rangka percepatan pelayanan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa pemulihan pascapandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak tahun 2020. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut juga merupakan respon atas permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022. Kebijakan layanan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar tersebut, adalah sebagai berikut:



B. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kemendikbudristek tahun 2022 diukur dari pencapaian 5 SS dan 20 IKSS yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kinerja Kemendikbudristek tersebut merupakan kinerja tahun ketiga Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020-2024. Secara umum, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 112,91%. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang			
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	75,38%	74,34%	98,62%
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,30%	99,10%	99,80%
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,14%	95,92%	99,77%
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88,39%	85,49%	96,72%
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,52%	31,16%	98,86%
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang			
IKSS 2.1	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,51	0,53	103,92%
IKSS 2.2	Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum			
	a. Literasi	47,50%	59,49%	125,24%
	b. Numerasi	28,30%	45,24%	159,86%
IKSS 2.3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	27,50%	27,52%	100,07%
IKSS 2.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	47,84%	50,95%	106,50%
IKSS 2.5	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5%	7,60%	152%
IKSS 2.6	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1	42,77%	45,22%	105,73%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
	Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP			
IKSS 2.7	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	19,70%	35,89%	182,18%
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	69	81,02	117,42%
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71	51,90	86,92%
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan			
IKSS 4.1	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	82.500 Karya	102.993 Karya	124,84%
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel			
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	WTP*)	100%
IKSS 5.2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	82	85,90	104,76%
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	BB*)	100%
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83	78,79*)	94,93%

*) Realisasi tahun 2021

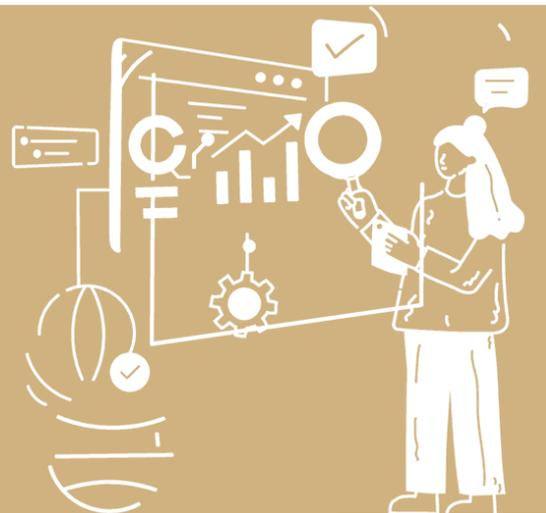
C. Capaian Kinerja

Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh SS dan IKSS tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

Ringkasan Kinerja



	 Target	 Realisasi	 Capaian (%)
Angka Kesiapan Sekolah	75,38%	74,34%	98,62%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,30%	99,10%	99,80%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,14%	95,92%	99,77%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88,39%	85,49%	96,72%
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,52%	31,16%	98,86%



Ketercapaian Sasaran Strategis terkait pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi diseluruh jenjang. Secara nasional, angka partisipasi diseluruh jenjang mengalami sedikit penurunan, walaupun tidak signifikan, dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM) Sederajat sebesar 0,26 poin menjadi 85,49 di tahun 2022, bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 85,23. Sedangkan Angka Kesiapan Sekolah AKS mengalami penurunan sebesar 0,35 poin (AKS tahun 2022: 74,34% dan AKS tahun 2021: 74,69%); Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, menurun 0,09 poin (APS 7-12 tahun pada tahun 2022: 99,10% dan APS 7-12 tahun pada tahun 2021: 99,19%); APS 13-15 tahun menurun 0,07 poin (APS 13-15 tahun pada tahun 2022: 95,92% dan APS 13-15 tahun pada tahun 2021: 95,99%). Penjelasan lebih lanjut terkait penurunan terdapat pada masing-masing IKSS.

Intervensi utama pemerataan layanan pendidikan fokus pada pemberian bantuan pendidikan baik bagi peserta didik maupun bagi satuan pendidikan sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan semakin terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun terdapat penurunan angka partisipasi sekolah di beberapa jenjang, peningkatan APK pada kelompok pendapatan terendah, khususnya untuk SMA/Sederajat dan PT tetap terjadi. Misalnya, APK SMA/Sederajat pada kelompok 20% termiskin (Kuintil 1) meningkat menjadi 74,90 dari tahun 2021 sebesar 73,20. Demikian juga untuk APK PT pada kelompok 20% termiskin mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 19,50, dari yang sebelumnya sebesar 15,90 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan kontribusi Kemendikbudristek seperti PIP dan KIP Kuliah memberikan manfaat positif pada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan.

Mulai tahun 2022, terdapat penyesuaian indikator kinerja pada Renstra Kemendikbudristek untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini yaitu:

- 1 Angka Kesiapan Sekolah untuk menggantikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;
- 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun untuk menggantikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD sederajat; dan
- 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun untuk menggantikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP sederajat.

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 5 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari 5 IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 1.1 Angka Kesiapan Sekolah

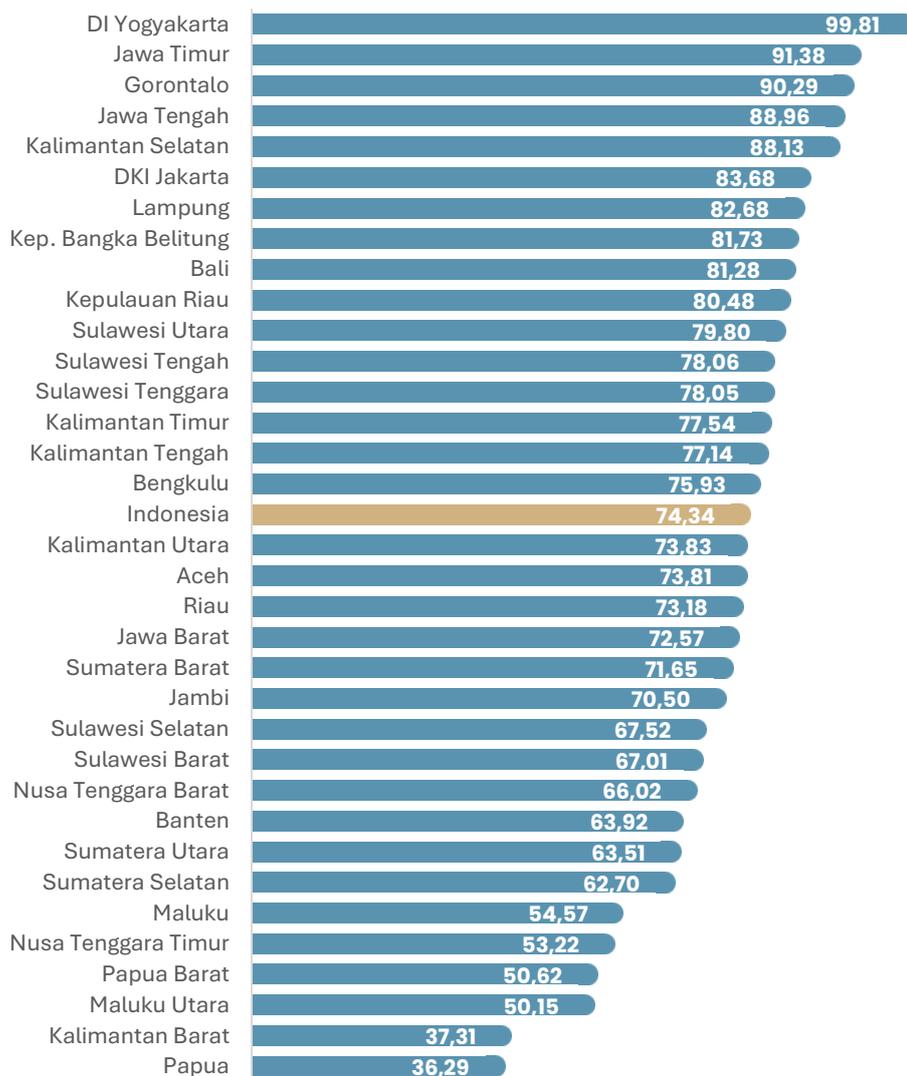
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1

SD/MI/SDLB/Sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti prasekolah (Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal/PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD,



TAAM, PAUD PAK, PAUD BIA, TKQ) terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat.

Capaian target AKS tahun 2022 sebesar 74,34%, lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 75,38%, atau realisasi capaian sebesar 98,62%. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, APS cenderung stagnan diangka 74%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 74,69%, terdapat penurunan sebesar 0,35 di tahun 2022. Hal ini salah satunya disebabkan oleh proses pemulihan akibat pandemi Covid-19, khususnya pada keluarga dari kelompok ekonomi terendah yang belum memprioritaskan pendidikan prasekolah. Selain itu, AKS pada kelompok disabilitas juga masih terdapat kesenjangan, yakni 69,34% pada kelompok disabilitas, dan 74,36% pada kelompok nondisabilitas. Angka Kesiapan Sekolah menurut kelompok status ekonomi pun masih mengalami kesenjangan, yaitu 81,03% pada kelompok dengan status ekonomi rumah tangga teratas (kuintil 5) dan 68,78% pada kelompok ekonomi rumah tangga terendah (kuintil 1). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kemendikbudristek maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penerima bantuan pendidikan merupakan kelompok masyarakat kurang mampu. Bila melihat capaian AKS antarprovinsi, terdapat 16 provinsi (47,06%) yang melebihi capaian nasional, dengan AKS tertinggi sebesar 99,81% di Provinsi DI Yogyakarta serta AKS terendah sebesar 36,29% di Provinsi Papua.



Sumber: Susenas Kor 2022

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk membantu operasional Lembaga PAUD;
- 2 Pemberian BOP PAUD kepada peserta didik PAUD termasuk dengan yang berkebutuhan khusus;
- 3 Pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui revitalisasi, dengan menggunakan basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
- 4 Pemberian bantuan afirmasi melalui bantuan layanan khusus kepada satuan PAUD dan lembaga terkait.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Banyaknya jumlah satuan PAUD yang ada serta status kepemilikan PAUD sebagian besar dimiliki oleh masyarakat sehingga mengakibatkan proses validasi data harus lebih mendalam guna mendapatkan data yang valid terkait penerima bantuan pendidikan;
- 2 Pengetahuan akan pentingnya pendidikan prasekolah dalam mengoptimalkan potensi anak belum menjadi prioritas orang tua calon peserta didik; dan
- 3 Proses pemulihan pascapandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, juga berdampak pada keraguan orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke satuan PAUD.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

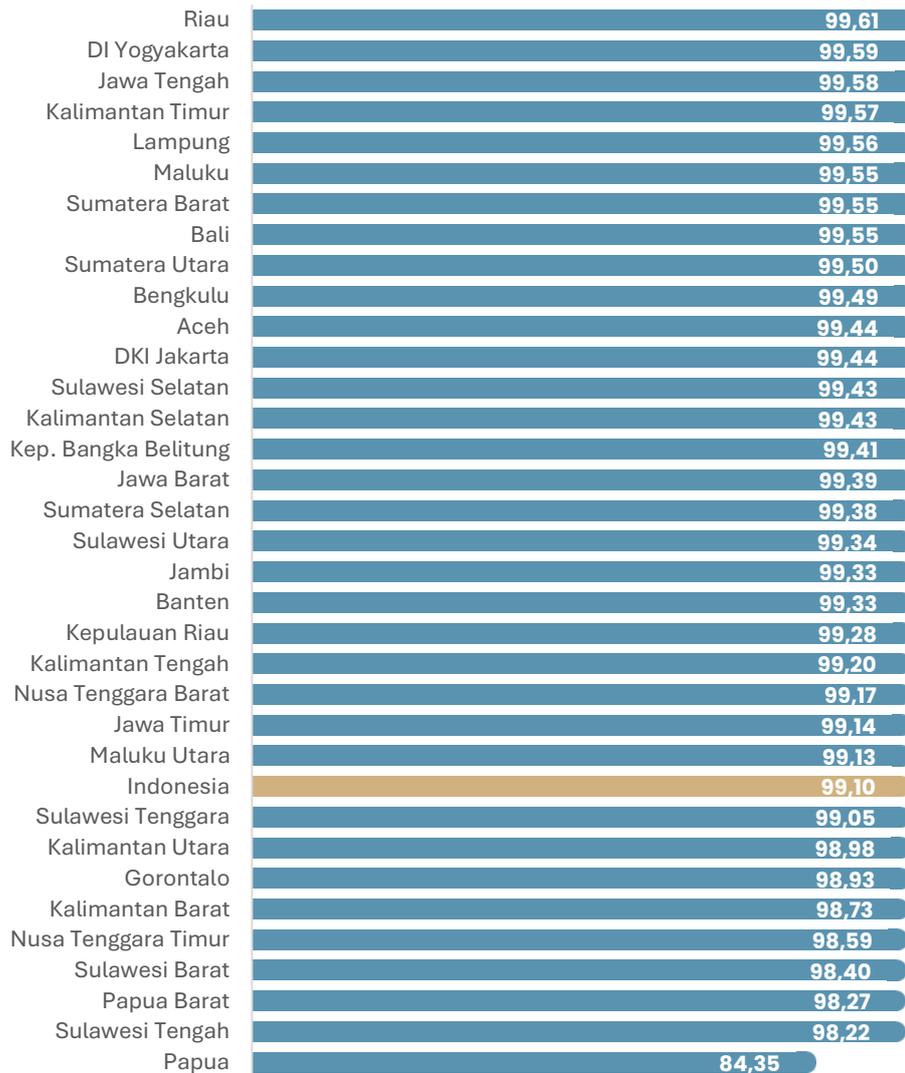
- 1 Mengoptimalkan pemberian BOP PAUD khususnya kepada masyarakat dari tingkat ekonomi rendah termasuk kelompok disabilitas, perbaikan proses pendataan dan validasi, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan bantuan pendidikan agar tepat sasaran;
- 2 Mendorong pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi dan renovasi sekolah serta kegiatan pembangunan lainnya;
- 3 Bekerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua calon peserta didik mengenai pentingnya pendidikan prasekolah dalam mengoptimalkan potensi anak; dan
- 4 Mengurangi dampak dari hilangnya pembelajaran (*learning loss*) dengan menerapkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Realisasi	2022	Akhir Periode Renstra
2020 99,26%	Target 99,30%	Target 99,34%
2021 99,19%	Realisasi 99,10%	Capaian 99,76%
	Capaian 99,80%	

Pada tahun 2022, APS 7-12 tahun semakin mendekati nilai ideal (100%), yakni 99,10%. Meskipun tidak terlalu signifikan, terjadi penurunan APS 7-12 tahun dari 99,19% di tahun 2021, menjadi 99,10% ditahun 2022, dengan persentase capaian sebesar 99,80%. Hampir tidak ditemukan kesenjangan pada APS 7-12 tahun, baik berdasarkan wilayah perkotaan atau pedesaan (99,33% berbanding 98,80%), berdasarkan jenis kelamin (98,98% laki-laki berbanding 99,23% perempuan), maupun berdasarkan status ekonomi (98,66% pada kuintil 1 berbanding 99,17% pada kuintil 5). Namun demikian, APS 7-12 tahun agak berbeda bila dilihat berdasarkan disabilitas dan nondisabilitas, dimana pada kelompok disabilitas masih lebih rendah, yakni 91,75%, dibandingkan dengan nondisabilitas di angka 99,14%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi untuk kelompok disabilitas masih perlu dioptimalkan. Secara umum, perkembangan APS 7-12 tahun di Indonesia sudah cukup merata jika dilihat menurut provinsi, kecuali Papua yang baru mencapai 84,35%; sementara itu, provinsi lain sudah mencapai lebih dari 98%, dimana terdapat 25 provinsi (73,53%) yang telah melebihi capaian nasional.



Sumber: Susenas Kor 2022

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah bagi peserta didik jenjang SD Sederajat dengan menggunakan basis data Dapodik;
- 2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan seperti RKB, dan revitalisasi dengan menggunakan basis data Dapodik;
- 3 Memberikan bantuan sarana pembelajaran khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung program digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan mengurangi dampak dari hilangnya pembelajaran (*learning loss*), dengan menggunakan basis data Dapodik;

- 4 Pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik SD sederajat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan;
- 5 Pemberian bantuan pendidikan bagi SDLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan Pendidikan terdampak bencana; dan
- 6 Memfasilitasi pendidikan anak-anak *Community Learning Center* (CLC) yang merupakan lembaga pendidikan alternatif untuk anak-anak TKI di Sabah, Malaysia.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat data anomali pada sistem Dapodik, yang disebabkan belum optimalnya proses pemutakhiran dan sinkronisasi data, serta masih adanya peserta didik dari keluarga rentan miskin yang belum memiliki NIK;
- 2 Terhambatnya penyaluran dana BOS dan PIP dikarenakan adanya kendala dalam proses aktivasi rekening terutama bagi wilayah yang sulit menjangkau akses layanan perbankan;
- 3 Laporan atas penggunaan dana BOS sebagai salah satu syarat penyaluran belum secara tertib dilaksanakan oleh satuan pendidikan sehingga menghambat waktu penyaluran bantuan, terutama di daerah 3T yang terbatas dari sisi akses;
- 4 Masih terdapatnya peserta didik dari keluarga ekonomi kurang yang harus putus sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah; dan
- 5 Kurang meratanya sebaran satuan pendidikan, sehingga masih ditemukannya lokasi satuan pendidikan jauh dari tempat tinggal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan berupa BOS dan PIP, melalui perbaikan mekanisme penyaluran, menggunakan *unit cost* majemuk (besaran bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) pada dana BOS serta melakukan penyaluran secara langsung;
- 2 Meningkatkan proses verifikasi dan validasi Dapodik sebagai dasar perencanaan terutama untuk memetakan daerah-daerah dengan presentasi APS di bawah rata-rata, agar bantuan pendidikan lebih tepat;

- 3 Melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, memberikan jalur pendidikan alternatif seperti program paket A untuk daerah yang membutuhkan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan terutama jaringan teknologi informasi;
- 4 Meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar-kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua satuan pendidikan telah di validasi dan memiliki rekening yang sudah di aktivasi oleh layanan perbankan;
- 5 Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran sehingga tidak menghambat proses penyaluran bantuan; dan
- 6 Mendukung optimalisasi penyebaran sekolah dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi pada masing-masing daerah.



IKSS 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

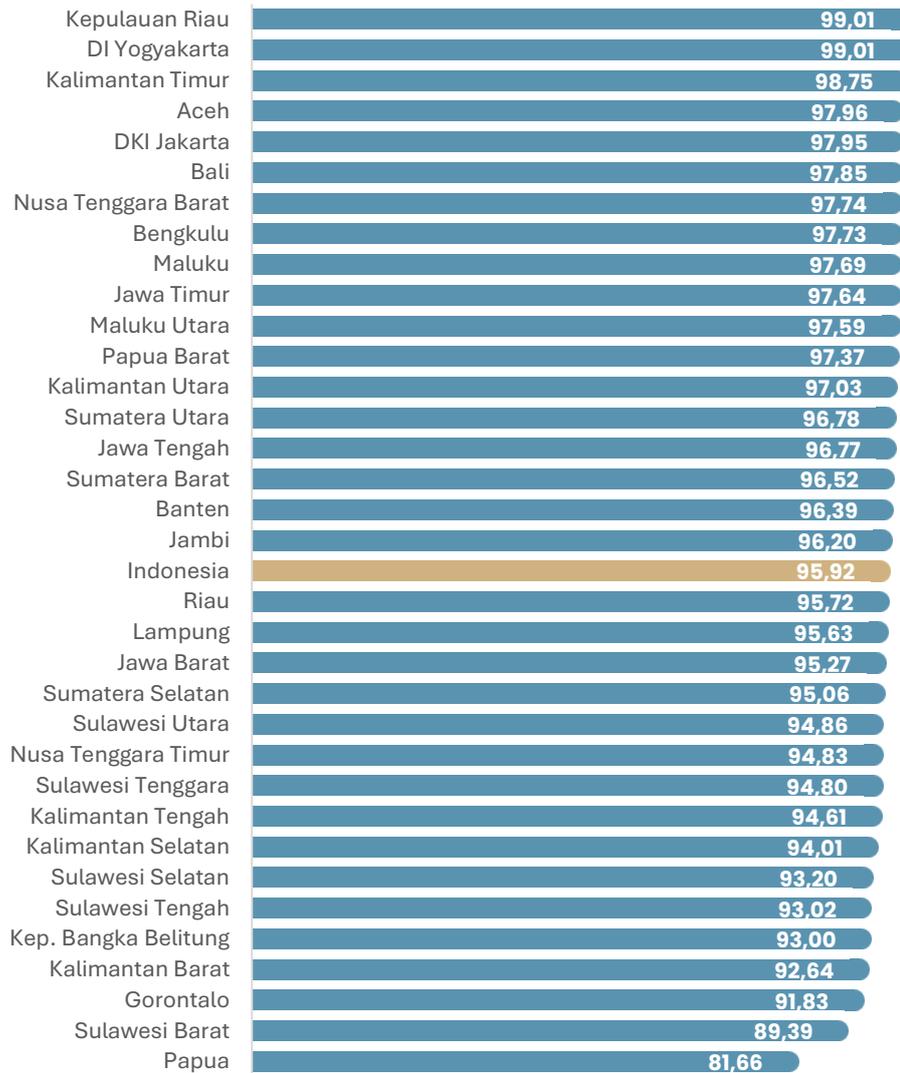
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Realisasi	2022	Akhir Periode Renstra
2020 95,74%	Target 96,14%	Target 96,55%
2021 95,99%	Realisasi 95,92%	Capaian 99,35%
	Capaian 99,77%	

Pada tahun 2022, capaian APS 13-15 tahun sebesar 95,92%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 96,14%, atau realisasi capaian sebesar 99,77%. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan dan cenderung stagnan diangka 95%, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, APS 13-15 tahun ditahun 2022 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan sebesar 0,07 poin. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena masih ditemukannya peserta didik yang putus sekolah, yakni sebesar 6,94% di tahun 2022, lebih besar 0,17 poin dari tahun 2021 sebesar 6,77%.

Kesenjangan APS 13-15 tahun cukup besar ditemukan pada kelompok disabilitas dan nondisabilitas, yakni 65,05% pada kelompok disabilitas, dan 96,09% pada kelompok nondisabilitas, serta kelompok status ekonomi yaitu 97,92% pada kelompok dengan status ekonomi rumah tangga teratas (kuintil 5) dan 93,04% pada kelompok ekonomi rumah tangga terendah (kuintil 1).

Sama halnya dengan APS 7-12 tahun, perkembangan APS 13-15 tahun di Indonesia sudah cukup merata jika dilihat menurut provinsi yakni di atas 90%, kecuali Papua yang baru mencapai 81,66% dan Sulawesi Barat sebesar 89,39%. Secara keseluruhan, terdapat 18 provinsi (52,94%) yang mencapai APS 13-15 tahun melebihi capaian nasional.



Sumber: Susenas Kor 2022

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Pemberian BOS untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah bagi peserta didik jenjang SMP sederajat, menggunakan basis data Dapodik;
- 2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan antara lain RKB dan revitalisasi, menggunakan basis data Dapodik;
- 3 Memberikan bantuan sarana pembelajaran khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung program digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan mengurangi dampak dari hilangnya pembelajaran (*learning loss*), dengan menggunakan basis data Dapodik;

- 4 Pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik SMP sederajat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan;
- 5 Pemberian bantuan pendidikan bagi SMPLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan pendidikan terdampak bencana; dan
- 6 Memfasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka peningkatan mutu jenjang SMP kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, BBPMP/BPMP dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu penyelenggara layanan *Community Learning Center* (CLC).

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat data anomali pada sistem Dapodik, yang disebabkan belum optimalnya proses pemutakhiran dan sinkronisasi data, serta masih adanya peserta didik dari keluarga rentan miskin yang belum memiliki NIK;
- 2 Terhambatnya penyaluran dana BOS dan PIP dikarenakan adanya kendala dalam proses aktivasi rekening terutama bagi wilayah yang sulit menjangkau akses layanan perbankan;
- 3 Laporan atas penggunaan dana BOS sebagai salah satu syarat penyaluran belum secara tertib dilaksanakan oleh satuan pendidikan sehingga menghambat waktu penyaluran bantuan, terutama di daerah 3T yang terbatas dari sisi akses;
- 4 Masih terdapatnya peserta didik dari keluarga ekonomi kurang yang harus putus sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah; dan
- 5 Belum optimalnya dukungan serta komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan SPM melalui penganggaran serta peraturan daerah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan berupa BOS dan PIP, melalui perbaikan mekanisme penyaluran, menggunakan *unit cost* majemuk (besaran bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) pada dana BOS serta melakukan penyaluran secara langsung;
- 2 Meningkatkan proses verifikasi dan validasi Dapodik sebagai dasar perencanaan terutama untuk memetakan daerah-daerah dengan presentasi APS di bawah rata-rata, agar bantuan pendidikan lebih tepat;

- 3 Melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, memberikan jalur pendidikan alternatif seperti program paket B untuk daerah yang membutuhkan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan terutama jaringan teknologi informasi;
- 4 Meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar-kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua satuan pendidikan telah di validasi dan memiliki rekening yang sudah di aktivasi oleh layanan perbankan; dan
- 5 Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran sehingga tidak menghambat proses penyaluran bantuan.

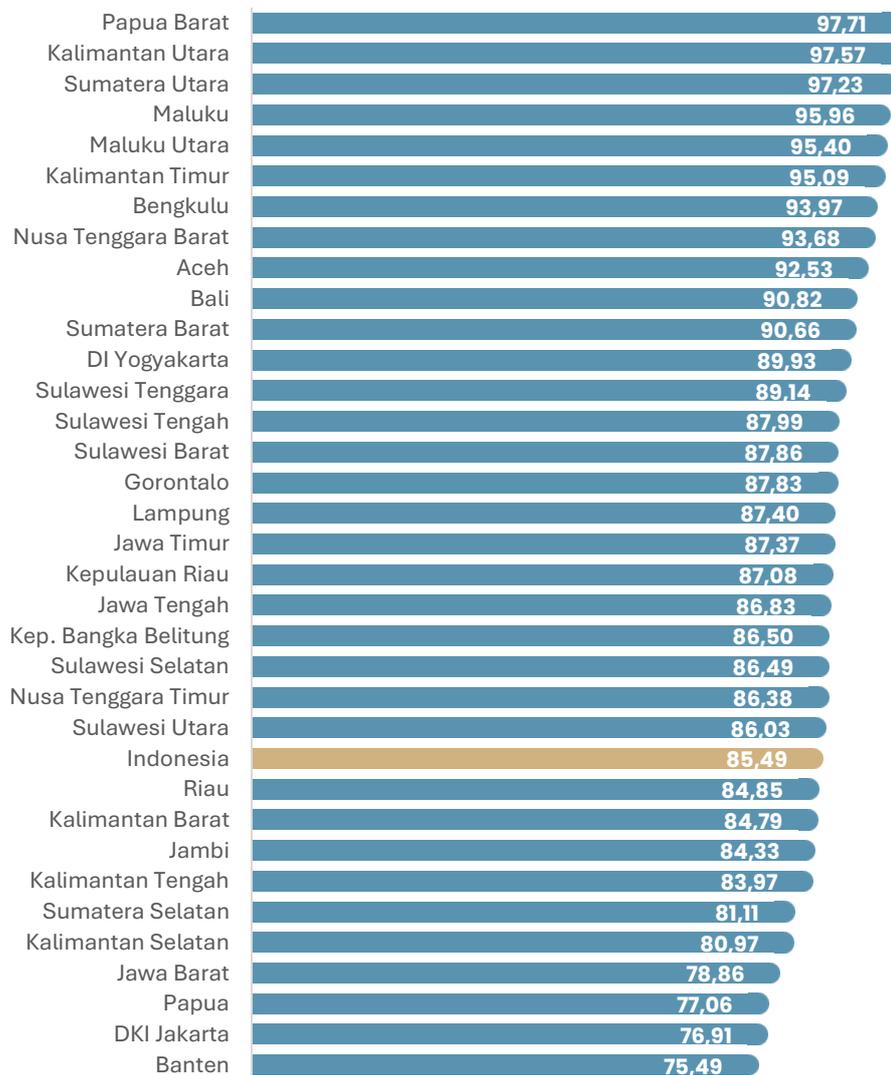
IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk berusia 16-18 tahun.

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 86,18%	Target 88,39%	Target 88,39%	Target 95%
Realisasi 84,53%	Realisasi 85,23%	Realisasi 85,49%	Capaian 89,99%
Capaian 98,08%	Capaian 96,42%	Capaian 96,72%	

Realisasi APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat tahun 2022 sebesar 85,49%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni sebesar 88,39%, atau realisasi capaian sebesar 96,72%. Meskipun APK tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun, APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat secara nasional tetap mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin dibanding tahun 2021. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat relatif meningkat. Bila dibandingkan dengan APK Pendidikan Menengah di Asia Tenggara, Indonesia masih sedikit lebih baik dari Malaysia yakni sebesar 85,23 di tahun 2021 (Malaysia sebesar 84,40 di tahun 2021). Namun, bila dibandingkan dengan Filipina dan Thailand, Indonesia masih lebih rendah karena APK Pendidikan Menengah di Filipina sudah mencapai 90,44 dan Thailand sebesar 98,02 di tahun 2021. Upaya dan strategi inovatif sangat diperlukan agar peningkatan APK jenjang Sekolah Menengah sederajat di Indonesia dapat lebih optimal.

Kesenjangan APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat masih terlihat pada kelompok disabilitas dan nondisabilitas, yakni 50,03% pada kelompok disabilitas, dan 85,72% pada kelompok nondisabilitas. Selain itu, kesenjangan yang cukup besar terlihat antara kelompok status ekonomi, yaitu 96,08% pada kelompok dengan status ekonomi rumah tangga teratas (kuintil 5) dan 74,93% pada kelompok ekonomi rumah tangga terendah (kuintil 1). Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan memprioritaskan kelompok dari ekonomi terendah dan kelompok disabilitas.



Sumber: Susenas Kor 2022

Pada level provinsi, kesenjangan APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat cukup terlihat, dimana APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat terendah di Banten sebesar 75,49%, dan tertinggi di Papua Barat sebesar 97,71%, serta terdapat 24 provinsi (70,59%) yang melebihi capaian nasional.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Pemberian BOS untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah bagi peserta didik jenjang SM sederajat, menggunakan basis data Dapodik;
- 2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan antara lain RKB dan revitalisasi, menggunakan basis data Dapodik;
- 3 Memberikan bantuan saran pembelajaran (TIK) untuk mendukung program digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan mengurangi dampak dari hilangnya pembelajaran (*learning loss*), menggunakan basis data Dapodik;
- 4 Pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik SM sederajat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan;
- 5 Pemberian bantuan pendidikan bagi SMLB sederajat untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas, serta bantuan bagi satuan pendidikan terdampak bencana;
- 6 Melakukan pendampingan anak rentan putus sekolah bersama lembaga atau pemerintah daerah; dan
- 7 Pemberian bantuan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) kepada siswa yang berasal dari wilayah Papua, Papua Barat, 3T, dan repatriasi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat data anomali pada sistem Dapodik, yang disebabkan belum optimalnya proses pemutakhiran dan sinkronisasi data, serta masih adanya peserta didik dari keluarga rentan miskin yang belum memiliki NIK;
- 2 Terhambatnya penyaluran dana BOS dan PIP dikarenakan adanya kendala dalam proses aktivasi rekening terutama bagi wilayah yang sulit menjangkau akses layanan perbankan;
- 3 Laporan atas penggunaan dana BOS sebagai salah satu syarat penyaluran belum secara tertib dilaksanakan oleh satuan pendidikan sehingga menghambat waktu penyaluran bantuan, terutama di daerah 3T yang terbatas dari sisi akses;
- 4 Masih terdapatnya peserta didik dari keluarga ekonomi kurang mampu yang harus putus sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah;

- 5 Belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperhatikan siswa rentan putus sekolah; dan
- 6 Belum seimbangnya jumlah satuan pendidikan SM sederajat dengan jumlah penduduk usia jenjang SM sederajat.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

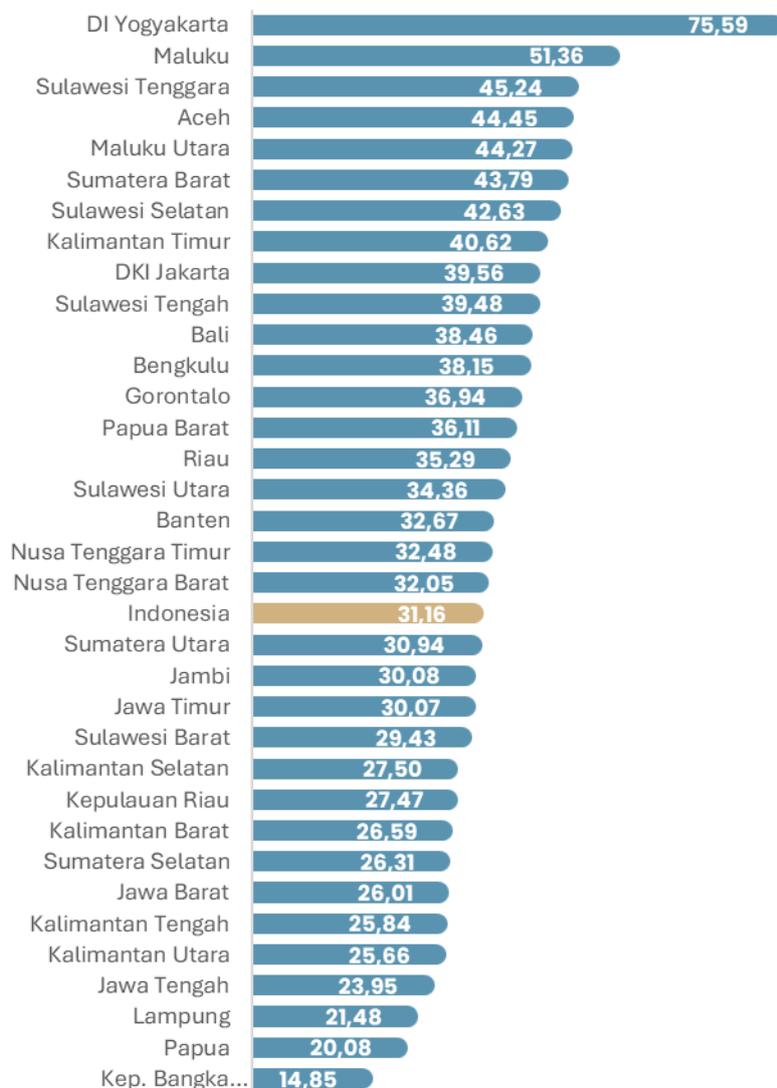
- 1 Meningkatkan kinerja dan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan berupa BOS dan PIP, melalui perbaikan mekanisme penyaluran, menggunakan *unit cost* majemuk (besaran bantuan berdasarkan tingkat kemahalan daerah dan skala ekonomi) pada dana BOS serta melakukan penyaluran secara langsung;
- 2 Meningkatkan proses verifikasi dan validasi Dapodik sebagai dasar perencanaan terutama untuk memetakan daerah-daerah dengan presentasi APS di bawah rata-rata, agar bantuan pendidikan lebih tepat;
- 3 Melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti renovasi dan pemberian TIK, memberikan jalur pendidikan alternatif seperti program paket C untuk daerah yang membutuhkan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan terutama jaringan teknologi informasi;
- 4 Meningkatkan koordinasi antarunit di Kemendikbudristek, maupun antar-kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan semua satuan pendidikan telah di validasi dan memiliki rekening yang sudah di aktivasi oleh layanan perbankan;
- 5 Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran sehingga tidak menghambat proses penyaluran bantuan;
- 6 Mengoptimalkan serta mempertimbangkan perbedaan kondisi daerah untuk menyeimbangkan sebaran SM sederajat terutama pada daerah tertinggal; dan
- 7 Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk yang berusia 19-24 tahun.

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 33,47%	Target 34,56%	Target 31,52%	Target 37,63%
Realisasi 30,85%	Realisasi 31,19%	Realisasi 31,16%	
Capaian 92,17%	Capaian 90,25%	Capaian 98,86%	Capaian 82,81%

Secara umum, APK Pendidikan Tinggi masih relatif rendah bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, APK Pendidikan Tinggi cenderung stagnan di angka 30%-an. APK Pendidikan Tinggi tahun 2022 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan menjadi 31,16%, lebih rendah dari tahun 2021 yang sudah mencapai 31,19%, atau turun sebesar 0,03 poin, dengan realisasi capaian sebesar 98,86%. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi, antara lain pemberian bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat dari ekonomi kurang mampu, pemberian bantuan pendidikan bagi wilayah afirmasi atau 3T, serta berbagai bantuan pendidikan lainnya. Selain itu, dukungan bantuan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk pemerataan ketersediaan pendidikan tinggi berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, APK Pendidikan Tinggi di Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan data pada laman World Bank, APK Pendidikan Tinggi tahun 2021 di Vietnam sudah mencapai 35,39; Filipina sebesar 35,52; dan Thailand bahkan sudah mencapai 43,82. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengupayakan strategi yang tepat, agar berdampak pada peningkatan APK Pendidikan Tinggi.



Sumber: Susenas Kor 2022

Pada level provinsi, kesenjangan APK Pendidikan Tinggi sangat terlihat, dimana angka terendah sebesar 14,85% di Kep. Bangka Belitung dan tertinggi sebesar 75,59% di DI Yogyakarta. Secara keseluruhan, terdapat 19 provinsi (55,88%) yang memiliki APK Pendidikan Tinggi di atas capaian nasional.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum kepada PTN;
- 2 Dukungan bantuan pengembangan sarana dan prasana bagi perguruan tinggi, baik melalui APBN maupun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta melalui pembiayaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
- 3 Pemberian bantuan melalui program KIP Kuliah, yakni program beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi



terbatas, yang juga merupakan salah satu proyek strategis pada RPJMN tahun 2020-2024;

- 4 Pemberian bantuan pendidikan dan berbagai beasiswa bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah terutama dari wilayah afirmasi dan 3T; dan
- 5 Memberikan rekomendasi pendirian perguruan tinggi, rekomendasi pembukaan dan perubahan program studi, serta rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih belum meratanya ketersediaan dan pembangunan perguruan tinggi terutama di daerah 3T;
- 2 Faktor ekonomi merupakan penyebab utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- 3 Proses pemulihan pascapandemi saat ini serta adanya perubahan kebijakan terkait persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menyebabkan pembangunan sarana di beberapa PTN menjadi terhambat dari jadwal yang sudah ditetapkan; dan
- 4 Adanya perubahan kebijakan dalam proses pemberian rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan akselerasi pemerataan pembangunan untuk ketersediaan akses perguruan tinggi di daerah 3T;
- 2 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan dan berbagai beasiswa bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah terutama dari wilayah afirmasi dan 3T;
- 3 Mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan sumber dana SBSN dan PHLN serta menyesuaikan dengan kebijakan terkait TKDN dan menyelesaikan persyaratan administrasi untuk bahan baku yang tidak dapat disubstitusi; dan
- 4 Melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan kebhakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang



Ringkasan Kinerja

	 Target	 Realisasi	 Capaian (%)
Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,51	0,53	103,92%
Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum			
a. Literasi	47,50%	59,49%	125,24%
b. Numerasi	28,30%	45,24%	159,86%
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	27,50%	27,52%	100,07%
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	47,84%	50,95%	106,50%
Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5%	7,60%	152,00%
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	42,77%	45,22%	105,73%
Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	19,70%	35,89%	182,18%



Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang ditandai dengan meningkatnya nilai capaian pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan. Indikator yang terdapat pada SS ini hampir seluruhnya adalah indikator yang baru mulai diukur pada tahun 2022 menyesuaikan perubahan Renstra Kemendikbudristek yang dilakukan di tahun 2022. Salah satu indikator yang sudah diukur mulai tahun 2020 adalah persentase guru dan tenaga kependidikan profesional. Sampai dengan tahun 2022, persentase capaian dari IKSS tersebut sudah mencapai 50,95%, lebih baik 2,74 poin dari tahun 2021 (48,21%) dan 4,94 poin dari tahun 2020 (46,01%). Selain itu, capaian angka kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi juga melebihi yang ditargetkan; untuk lulusan pendidikan vokasi, sebesar 45,22%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 42,77%. Sedangkan, angka kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi akademik sebesar 35,89%, lebih tinggi dari target kinerja tahun 2022 sebesar 19,70%. Membaiknya angka kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi tersebut juga berdampak pada menurunnya angka pengangguran pada tingkat nasional. Berdasarkan data dari Sakernas BPS, Angka Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 5,68% lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 6,49%. Kemendikbudristek terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan kinerja pendidikan dengan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi diseluruh jenjang melalui berbagai program dan kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar.

Adapun indikator kinerja yang mulai diukur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1** Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD;
- 2** Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum:
 - a. Literasi;
 - b. Numerasi.
- 3** Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik;
- 4** Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya;
- 5** Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP; dan
- 6** Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1,2x UMP).

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 8 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari 8 IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 2.1 Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD

Nilai kualitas lingkungan belajar adalah perhitungan dari sejumlah indikator yang tergabung dalam dua kategori, yaitu:

1 Kualitas proses pembelajaran, meliputi dimensi Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pengembangan yang sesuai kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran.

2 Kualitas pengelolaan satuan PAUD berdasarkan kerangka profil pendidikan anak usia dini, meliputi dimensi Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial, Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, Indeks iklim inklusivitas sekolah, Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, Indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan, Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan PAUD dan di rumah, Indeks kapasitas perencanaan, Indeks akuntabilitas pembiayaan, dan pemanfaatan sumber daya satuan PAUD.

2022	Akhir Periode Renstra
Target 0,51	Target 0,53
Realisasi 0,53	
Capaian 103,92%	Capaian 100%

Interpretasi nilai dengan rentang 0-1 adalah semakin angka mendekati 1 kualitas lingkungan belajar untuk satuan PAUD tersebut dalam hal proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD telah memenuhi semua indikator yang menunjukkan bahwa satuan PAUD tersebut berkualitas.

Capaian target nilai kualitas lingkungan belajar PAUD yang mulai diukur tahun 2022 sebesar 0,53 poin, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 0,51 poin, atau realisasi capaian sebesar 103,92%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Penyusunan instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) PAUD terstandar;

- 2 Melakukan ujicoba dan revidi instrumen Sulingjar PAUD;

- 3 Menyusun *standard setting* Sulingjar PAUD;

- 4 Melakukan pendampingan pelaksanaan Sulingjar PAUD;

- 5 Menyusun hasil analisis dan pelaporan hasil ujicoba Sulingjar PAUD;

- 6 Penyediaan berbagai naskah pedoman kebijakan (NPK) sebagai acuan kepada satuan PAUD;

- 7 Penyusunan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan dan evaluasi sistem pendidikan pada jenjang PAUD;

- 8 Advokasi dan pendampingan ke daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dalam rangka pembinaan satuan PAUD;

- 9 Melakukan pemanfaatan data hasil akreditasi PAUD sebanyak 34.760 satuan PAUD;

- 10 Memberikan bantuan PAUD-HI kepada satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif di Kabupaten/Kota; dan

- 11 Memberikan bantuan kepada satuan PAUD yang melaksanakan program UKS untuk mendorong satuan PAUD meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan program UKS, untuk membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Jumlah satuan PAUD yang sangat banyak sekitar 208.730 satuan pendidikan, dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia sehingga cukup sulit untuk mendapatkan hasil ujicoba pemanfaatan Sulingjar secara optimal;

- 2 Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana serta kompetensi SDM di seluruh PAUD karena sebagian besar PAUD dimiliki dan dikelola oleh masyarakat;

- 3 Belum tersedianya Pedoman Operasional Standar (POS) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Sulingjar PAUD;
- 4 Rencanan Aksi Daerah (RAD) PAUD-HI belum seluruhnya didukung oleh penetapan regulasi dalam bentuk peraturan Bupati atau atau Walikota, sehingga alokasi anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan PAUD-HI belum optimal di masing-masing daerah; dan
- 5 Masih banyak satuan PAUD yang telah melaksanakan layanan holistik intergratif, tetapi belum melakukan pembaharuan pengisian pemenuhan indikator PAUD-HI di Dapodik sehingga tidak terdata sebagai satuan PAUD yang menyelenggarakan holistik integratif.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas pendidikan Kabupaten/Kota) dan UPT Kemendikbudristek yang ada di daerah untuk bersama-sama secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait pemanfaatan data Akreditasi dan mensosialisasikan penggunaan Sulingjar;
- 2 Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas satuan PAUD melalui pemanfaatan Dana Desa serta sumber dana lainnya;
- 3 Pemberian bantuan kepada kabupaten/kota untuk mendukung layanan PAUD-HI;
- 4 Sosialisasi layanan PAUD-HI melalui webinar dan video tutorial pengisian layanan PAUD-HI di Dapodik; dan
- 5 Meningkatkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Bappeda, dalam menindaklanjuti program PAUD-HI di tahun yang akan datang.

IKSS 2.2 Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

AN diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK. Populasi peserta AN adalah sebagai berikut.

- 1 Peserta didik kelas 5 jenjang SD/MI/SDLB Sederajat
- 2 Peserta didik kelas 8 SMP/MTs/SMPLB Sederajat
- 3 Peserta didik kelas 11 SMA/MA/SMALB Sederajat
- 4 Peserta didik kelas 11 SMK/MAK

Kemendikbudristek melakukan *sampling* terhadap populasi peserta AN tersebut pada setiap satuan pendidikan. Pada jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, dipilih sampel peserta maksimal 30 orang per satuan pendidikan. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK, dipilih sampel peserta maksimal 45 orang per satuan pendidikan.

Pada AN, AKM merupakan jenis asesmen yang dilakukan Kemendikbudristek untuk mengetahui kompetensi minimal peserta didik dalam bidang literasi dan numerasi, yang merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan intervensi pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Hasil Asesmen Nasional dapat dilihat baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah melalui *platform* Rapor Pendidikan Kemendikbudristek.

a. Literasi

Kompetensi minimum literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kompetensi literasi minimum dimaksud adalah

kompetensi literasi membaca sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara bobot sampling pada satuan



pendidikan tertentu dikalikan dengan persentase peserta didik yang pada satuan pendidikan tertentu yang mencapai nilai diharapkan.

Peserta didik yang mengikuti AKM Literasi adalah peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau *Education Management Information System* (EMIS) yang memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) valid. Di samping itu peserta didik tersebut masih aktif belajar pada satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat kelas 5, jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat kelas 8, jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat kelas 11, dan peserta didik Tunarungu dan Tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi.

Untuk mendorong ketercapaian kompetensi minimum bidang literasi, Kemendikbudristek telah mendistribusikan 16.868.247 eksemplar buku ke satuan pendidikan, diantaranya sebanyak 57.087 satuan pendidikan di 3T dan non-3T, serta 554 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 283.609 Satuan Pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional di tahun 2021, sedangkan 282.962 Satuan Pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional di tahun 2022.

Pada tahun 2022, Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Literasi sebesar 59,49%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 47,50%, dengan capaian sebesar 125,24%. Tercapainya target ini disebabkan satuan pendidikan sudah mulai beradaptasi dengan pelaksanaan AKM Literasi yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2021.

b. Numerasi

Kompetensi numerasi adalah kompetensi sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara bobot sampling pada satuan pendidikan tertentu dikalikan dengan persentase peserta didik yang pada satuan pendidikan tertentu yang mencapai nilai diharapkan.



Asesmen Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Peserta didik

yang mengikuti AKM Numerasi adalah peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS dan memiliki NISN. Di samping itu peserta didik tersebut masih aktif belajar pada satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat kelas 5, jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat kelas 8, jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat kelas 11, dan peserta didik tunarungu dan tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi.

Pada tahun 2022, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Numerasi sebesar 45,24%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 28,30%, dengan capaian sebesar 159,86%. Tercapainya target ini disebabkan satuan pendidikan sudah mulai beradaptasi dengan pelaksanaan AKM Numerasi yang sudah mulai dilaksanakan mulai tahun 2021. Selain itu, ketercapaian indikator kinerja yang melebihi target, baik literasi dan numerasi, kemungkinan besar didukung oleh semakin banyaknya satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum Merdeka (lebih dari 150.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka); lebih dari 1,3 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memanfaatkan *platform* Merdeka Mengajar dalam rangka peningkatan kompetensi; dan lebih dari 14.000 satuan pendidikan dari 508 kabupaten/kota menjadi Sekolah Penggerak, dimana semua inisiatif yang tergabung dalam Kebijakan Merdeka Belajar tersebut mendukung pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Sekolah Penggerak di semua jenjang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi agen perubahan serta menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya;
- 2 Melakukan pembinaan dan pendampingan implementasi pembelajaran paradigma baru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran;
- 3 Melakukan pembinaan dan pendampingan terkait Manajemen Berbasis Sekolah;
- 4 Melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan AN pada satuan pendidikan;
- 5 Melakukan penyusunan, ujicoba, dan reviu instrumen AKM terstandar yang digunakan oleh satuan pendidikan;

- 6 Melakukan analisis dan pelaporan hasil AKM untuk disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan agar menjadi bahan evaluasi pelaksanaan AKM berikutnya;
- 7 Melakukan pengembangan dan pemanfaatan AKM Kelas dan asesmenpedia bagi pendidik dan peserta didik;
- 8 Keikutsertaan pada Penilaian Kompetensi Tingkat Internasional yang dilaksanakan melalui Program PISA;
- 9 Memberikan bantuan peralatan TIK kepada satuan pendidikan dengan tujuan semakin banyak satuan pendidikan yang dapat melaksanakan ANBK;
- 10 Melaksanakan akreditasi dalam rangka penjaminan mutu di satuan pendidikan;
- 11 Melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan kesetaraan dengan melakukan kurasi perangkat ajar Kurikulum Merdeka pada pendidikan kesetaraan, serta pemanfaatan *platform* Merdeka Mengajar; dan
- 12 Mendistribusikan buku bacaan ke satuan pendidikan, baik di wilayah 3T maupun non-3T.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Terdapat Kepala Sekolah Penggerak yang mengalami rotasi;
- 2 Anggaran TIK yang baru tersedia di akhir tahun;
- 3 Belum meratanya infrastruktur yang dapat mendukung pelaksanaan *Platform* digital IKM;
- 4 Belum meratanya sosialisasi dan informasi mengenai pemanfaatan *platform* AKM Kelas dan asesmenpedia ke seluruh wilayah Indonesia; dan
- 5 Secara teknis, di beberapa sekolah masih terkendala ketersediaan perangkat yang memadai, baik dalam pelaksanaan AN ataupun PISA.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan Kemendikbudristek terkait program Sekolah Penggerak;
- 2 Melakukan percepatan penyaluran TIK ke satuan pendidikan;

- 3 Melakukan sosialisasi pemanfaatan *platform* AKM Kelas dan asesmenpedia secara luring;
- 4 Melakukan sosialisasi dan informasi mengenai AN, AKM Kelas dan program PISA secara merata diseluruh daerah; dan
- 5 Melakukan analisis atas hasil pelaksanaan AN tahun 2022 untuk perbaikan selanjutnya.

IKSS 2.3 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.

2022	Akhir Periode Renstra
Target 27,50%	Target 32,50%
Realisasi 27,52%	
Capaian 100,07%	Capaian 84,68%

Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik terhadap jumlah satuan pendidikan semua jenjang.

Pada AN, survei karakter akan diberikan kepada peserta didik, sedangkan survei lingkungan belajar akan diberikan kepada peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan. Survei Karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan Profil Pelajar Pancasila (Beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Mandiri, Bernalar kritis, Kreatif, Bergotong royong, Berkebinekaan global) yang kemudian menghasilkan Indeks Karakter.

Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif dan spiritual. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, serta latar belakang keluarga murid. Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Survei karakter dan survei

lingkungan belajar akan menghasilkan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan.

Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu satuan pendidikan tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. Indeks iklim keamanan menunjukkan tingkat/ukuran keamanan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan pemahaman atas konsepsi, adanya program kebijakan satuan pendidikan, serta laporan frekuensi terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, serta kasus narkoba di satuan pendidikan. Indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan menunjukkan tingkat/ukuran inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan toleransi antarwarga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, komitmen kebangsaan, serta layanan untuk siswa dengan kebutuhan khusus baik disabilitas maupun Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa (CIBI).

Capaian indikator ini pada tahun 2022 sebesar 27,52% sedikit lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 27,50%, atau realisasi capaian sebesar 100,07%. Sebagai indikator yang baru diukur mulai tahun 2022 capaian indikator ini cukup menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan hasil AN yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1** Melakukan penyusunan, ujicoba, dan reviu instrumen Sulingjar dan survei karakter pendidikan dasar dan menengah yang terstandar;

- 2** Melakukan analisis dan pelaporan hasil Sulingjar dan Survei karakter pendidikan dasar dan menengah, sebagai bahan evaluasi pada satuan pendidikan untuk perbaikan kedepannya;

- 3** Melakukan pendampingan, sosialisasi, dan melaksanakan AN;

- 4** Pembuatan konten-konten terkait penguatan karakter dan menyebarkan melalui media sosial Kemendikbudristek serta melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan ekosistem pendidikan lainnya;

- 5** Melakukan pembinaan dan pendampingan penguatan ekstrakurikuler kepada satuan pendidikan untuk mendukung penguatan karakter;

-
- 6 Penyusunan berbagai modul-modul kegiatan ekstrakurikuler dan melakukan *workshop* dan *webinar* pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, simposium serta festival program penguatan profil Pelajar Pancasila; dan
 - 7 Melaksanakan pembinaan Unit Kesehatan Sekolah.
-

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Terdapat Kepala Sekolah penggerak yang mengalami rotasi;
- 2 Pelaksanaan program dan kegiatan masih terkendala pandemi Covid-19; dan
- 3 Keterbatasan penulis soal yang memiliki kompetensi profesional dan penguasaan teknis mengenai penulisan soal terstandar sehingga masih terdapat soal yang belum memenuhi kriteria.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan Kemendikbudristek terkait program Sekolah Penggerak;
- 2 Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan agar kembali melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara luring di satuan pendidikan; dan
- 3 Memberikan pelatihan penulisan soal terstandar bagi penulis soal dan melakukan revidi soal secara bertahap untuk mendapatkan butir soal yang berkualitas.

IKSS 2.4 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Professional

Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 47,43%	Target 48,33%	Target 47,84%	Target 49,83%
Realisasi 46,01%	Realisasi 48,21%	Realisasi 50,95%	
Capaian 97,96%	Capaian 99,75%	Capaian 106,50%	Capaian 102,25%

tenaga kependidikan. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah guru dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang mengikuti, menuntaskan dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah:

- 1 Kepala Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan
- 2 Pengawas Sekolah, yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Kriteria Guru dan tenaga kependidikan profesional adalah memiliki:

- 1 Kualifikasi Akademik Minimal S1 atau D-IV



Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

2 Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru atau tenaga kependidikan adalah melalui sertifikasi. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.

Tahun 2022, capaian terkait persentase guru dan tenaga kependidikan profesional tersebut sebesar 50,95%, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 47,84%, dengan persentase capaian sebesar 106,50%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 48,21%, terdapat peningkatan capaian, yakni sebesar 2,74 poin di tahun 2022. Capaian tahun 2022 ini didukung dengan hasil pencapaian dari 56.457 guru yang ditetapkan sebagai guru penggerak, 2.688.593 guru mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi yang dilakukan secara mandiri, 109.373 guru mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG) dan 293.860 guru honorer yang diangkat menjadi PPPK serta akan ditambah lagi 319.029 guru kelulusan formasi tahun 2022 yang akan diumumkan segera oleh Panselnas.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Koordinasi intensif terkait penyusunan dokumen acuan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 yaitu Permendikbud, Petunjuk Teknis, dan Pedoman dengan satuan kerja terkait;

 - a. kategori guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025 dengan minimal masa kerja tiga tahun;
 - b. kategori guru yang belum lulus UTN PLPG;
 - c. kategori guru yang telah memiliki sertifikat PGP.
- 3 Pendaftaran dan seleksi PPG dalam jabatan sebanyak dua tahap;
- 4 Sosialisasi pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan kepada dinas pendidikan di seluruh Indonesia;

- 5 Koordinasi penyelenggaraan PPG dalam jabatan bagi guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian;
- 6 Berkoordinasi dalam penambahan izin program studi PPG bagi perguruan tinggi dan juga penambahan bidang studi PPG pada perguruan tinggi penyelenggara PPG;
- 7 Pelatihan dalam bentuk penyegaran kepada dosen PPG terkait kurikulum PPG Dalam Jabatan tahun 2022 dan Program Merdeka Mengajar;
- 8 Monitoring dan evaluasi ke perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan untuk memantau pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sesuai petunjuk teknis; dan
- 9 Pembiayaan dalam mendukung kesejahteraan guru profesional melalui aneka tunjangan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Kemampuan penggunaan teknologi yang dimiliki oleh sebagian guru yang menjadi sasaran PPG Dalam Jabatan kurang memadai;
- 2 Gangguan listrik maupun koneksi internet di beberapa wilayah, serta bencana alam; dan
- 3 Penguasaan materi pedagogik dan profesional dari sebagian guru kurang memadai.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan agar:

- 1
 - a. Memberikan pembekalan penggunaan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan kepada mahasiswa.
 - b. Memberikan pembekalan tambahan dalam hal penguasaan materi pedagogik dan profesional sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG).

- 2 Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan perguruan tinggi penyelenggara dalam mengatasi masalah gangguan listrik, sinyal internet dan bencana alam yang dihadapi oleh mahasiswa.

IKSS 2.5 Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau bentuk penghargaan lainnya pada ajang talenta dan non-ajang talenta yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan/atau Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), atau pihak penyelenggara lainnya yang diakui oleh Puspresnas melalui proses kurasi. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah peserta didik berprestasi yang mendapatkan fasilitas karir belajar dan karir profesional terhadap jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem informasi manajemen talenta Puspresnas.

2022	Akhir Periode Renstra
Target 5%	Target 6%
Realisasi 7,60%	
Capaian 152%	Capaian 126,67%

Proses kurasi adalah proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Puspresnas terhadap ajang talenta dan/atau non-ajang talenta yang bukan diselenggarakan oleh BPTI dan/atau Puspresnas.

Ajang talenta adalah kegiatan kompetisi atau festival untuk menghasilkan peserta didik berprestasi. Non-ajang talenta adalah kegiatan exhibisi atau bentuk kegiatan lainnya di luar kompetisi dan festival yang menghasilkan peserta didik berprestasi.

Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 7,60%, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 5%, atau realisasi capaian sebesar 152%. Sebagai indikator yang baru diukur mulai tahun 2022 capaian indikator ini cukup menggembirakan; hal ini didukung antara lain melalui partisipasi Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional. Hasil ini juga sejalan dengan mulai dilaksanakannya ajang-ajang dan perlombaan yang dapat diikuti oleh peserta didik baik secara daring maupun luring atau kombinasi antara daring dan luring.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Penyusunan petunjuk teknis dan peraturan Sesjen untuk program persiapan S-1 Luar Negeri Beasiswa Indonesia Maju/Beasiswa Presiden;
- 2 Penyiapan *platfom* Sistem Informasi Manajemen Talenta;

- 3 Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap peserta didik beprestasi untuk melanjutkan karir belajarnya pada jenjang S1 perguruan tinggi luar negeri;
- 4 Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap peserta didik kelas 12 terpilih untuk mengikuti program Beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan pada jenjang S1 Luar Negeri;
- 5 Melaksanakan pengembangan ekosistem untuk kelangsungan karir belajar dan karir profesional antara lain mengupayakan peran masyarakat dunia usaha, filantropi dalam pelaksanaan program; dan
- 6 Menggalang peluang kemitraan dengan ekosistem manajemen talenta nasional.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja yaitu belum optimalnya dukungan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas untuk menangani program Manajemen Talenta Nasional, yang merupakan kebijakan nasional baru dan membutuhkan banyak pemikiran dan gagasan baru.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan perekrutan SDM non-PNS yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan; dan
- 2 Melakukan *outsourcing* SDM untuk menangani kegiatan dalam rangka penyelenggaraan beasiswa.

IKSS 2.6 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan pendidikan vokasi adalah lulusan SMK, pendidikan tinggi vokasi, dan lembaga kursus dan pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut.

Menggunakan sumber data Sakernas, BPS, indikator ini menghitung persentase Penduduk Usia Kerja (PUK) yang lulus pendidikan vokasi setahun terakhir dan bekerja terhadap seluruh PUK



yang lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir. Kategori lulusan pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di dunia kerja. Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha dikelola sendiri.

Sebagai salah satu prioritas nasional, pendidikan vokasi diharapkan dapat secara optimal mendukung penyerapan lulusan di dunia kerja. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024, Indonesia diharapkan mampu menciptakan 80% lulusan pendidikan tinggi vokasi yang siap bekerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah ke atas, serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari lulusan pendidikan vokasi untuk perbaikan sistem tata kelola pendidikan vokasi yang adaptif, responsif dan implementatif terhadap kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0.

Berdasarkan data Sakernas BPS, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 45,22%, lebih tinggi dari target ditetapkan sebesar 42,77%, atau realisasi capaian sebesar 105,73%. Sebagai salah satu program prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024, Kemendikbudristek terus berinovasi untuk memastikan lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga siap untuk berwirausaha.



PKW Program Keahlian Menjahit



PKK Program Keahlian Komputer



Penandatanganan Kontrak
Matching Fund Tahun 2022

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Program Sertifikasi Kompetensi (Sertikom) kepada mahasiswa PT Vokasi;

- 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD);

- 3 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);

- 4 Program *Matching Fund* kepada PT Vokasi;

- 5 Pelaksanaan program Sertifikasi kepada peserta didik SMK sebagai dukungan dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi DUDI;

- 6 Fasilitasi pengembangan SMK untuk menjadi pelaksana program Pusat Keunggulan, melalui skema pemadanan dukungan dengan melibatkan industri mitra;

- 7 Fasilitasi percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk SMK PK, dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, guru/instruktur tamu dari DUDI, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui *teaching factory* di sekolah, melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan perguruan tinggi;

- 8 Melakukan kajian dalam rangka pemetaan dan pengembangan kompetensi keahlian yang dianggap potensial dan prioritas untuk diberikan intervensi dengan melibatkan *expert* serta DUDI;

- 10 Fasilitasi penguatan mutu berstandar industri pada program studi di PT vokasi;

- 11 Program penguatan pendidikan tinggi vokasi - perguruan tinggi swasta;

- 12 Fasilitasi sertifikasi kompetensi dosen perguruan tinggi vokasi sesuai dengan bidang yang dimiliki;

- 13 Program Kecakapan Kerja (PKK);

- 14 Program Kecakapan Wirausaha (PKW);

- 15 Pelaksanaan *tracer study* untuk lulusan vokasi; dan

- 16 Fasilitasi guru kejuruan dan kepala sekolah yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Adanya blokir anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program;
- 2 Adanya pengalihan beberapa program kegiatan kemahasiswaan kepada program *flagship* Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 3 Terbitnya aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pertengahan tahun 2022 sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang;
- 4 Belum semua SMK memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1, sehingga pelaksanaan sertifikasi tidak bisa diikuti seluruh siswa SMK;
- 5 Masih ditemukannya SMK berpotensi mendapat program Pusat Keunggulan mendapatkan dana dari DAK, sehingga tidak bisa mendaftar sebagai SMK PK;
- 6 Kebutuhan tenaga kerja setingkat SMK bervariasi antardaerah sehingga mempengaruhi daya serap lulusan;
- 7 Belum optimalnya pemahaman mitra kerja dalam melaksanakan PKW, khususnya dalam melaksanakan pendampingan rintisan usaha;
- 8 Masih terbatasnya ketersediaan lowongan kerja sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga proses penyaluran lulusan PKK ke dunia kerja terhambat;
- 9 Masih terdapat peserta diklat *Upskilling* dan *Reskilling* untuk guru yang mengundurkan diri pada saat pelatihan akan dimulai. Selain itu, instruktur LKP hanya terfokus pada 1 bidang keahlian, karena terbatasnya informasi ketersediaan data rumpun keahlian; dan
- 10 Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan *tracer study* karena perubahan metadata Rapor Pendidikan yang sangat dinamis.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Mengupayakan untuk pembukaan blokir anggaran, serta tetap mengoptimalkan capaian target, meskipun ada blokir anggaran;
- 2 Melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- 3 Mendorong satuan kerja untuk mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan, dan memprioritaskan TKDN atau PDN. Jika alat/bahan yang dibutuhkan

tidak tersedia di dalam negeri, proses pengajuan ijin penggunaan barang impor dipercepat;

- 4 Mendorong pemda provinsi untuk memfasilitasi pendirian LSP P1 pada SMK binaannya;
- 5 Melakukan sosialisasi kepada pemda provinsi agar SMK yang diunggulkan menjadi SMK PK tidak diberi alokasi anggaran DAK;
- 6 Penetapan konsentrasi keahlian potensial berdasarkan rekomendasi dari konsorsium vokasi (terdiri dari asosiasi industri yang bergabung dalam konsorsium);
- 7 Mengoptimalkan peran lembaga penerima bantuan dalam melakukan pendampingan rintisan usaha sesuai dengan rincian rintisan usaha yang dibuat peserta didik, dan melakukan penyesuaian dan mendorong lembaga penerima PKW untuk berkordinasi dengan dunia kerja;
- 8 Mengoptimalkan jadwal pembelajaran PKK sebelum akhir tahun berjalan, dan lembaga penyelenggara diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi;
- 9 Melakukan pemanggilan peserta maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi resiko peserta mengundurkan diri, serta menyediakan lebih banyak *database* untuk LKP agar pelatihan yang dilaksanakan lebih bervariasi; dan
- 10 Melakukan koordinasi yang lebih intensif antara pengolah data, Direktorat Mitras DUDI dan tim Walidata di Rapor Pendidikan agar *tracer study* dapat dilakukan dengan lebih optimal.

IKSS 2.7 Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1,2x UMP)

Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1,2x UMP) adalah lulusan Program Sarjana di jenis pendidikan tinggi akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan.

2022	Akhir Periode Renstra
Target 19,70%	Target 20,50%
Realisasi 35,89%	
Capaian 182,18%	Capaian 175,07%

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi langsung bekerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. Daya saing lulusan ditunjukkan melalui masa tunggu mendapatkan pekerjaan

pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ini ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang sesuai dalam pekerjaan, saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, persentase lulusan langsung bekerja menjadi salah satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program penyaluran pendidikan dengan dunia kerja, sangat diperlukan data lulusan agar perguruan tinggi dapat lebih mempersiapkan calon lulusannya untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif.

Berdasarkan data Sakernas BPS, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 35,89%, lebih tinggi dari target ditetapkan sebesar 19,70%, atau realisasi capaian sebesar 182,18%. Capaian indikator ini melebihi target dikarenakan dunia usaha dan dunia industri mulai meningkat kembali pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19, hal ini juga ditandai dengan mulai pulihnya ekonomi pascapandemi. Selain itu, Kemendikbudristek secara terus menerus berupaya untuk melakukan inovasi dan strategi dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus sebanyak 1 semester, mendorong profesional berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui program Praktisi Mengajar, dan mengembangkan *platform* Kedaireka sebagai media sinergi bagi pendidikan tinggi dan industri.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dan Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM));
- 2 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- 3 Wirausaha Merdeka (WMK);
- 4 Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
- 5 *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) dan IISMAVO;
- 6 Kampus Mengajar (KM);

-
- 7 Praktisi Mengajar; dan
 - 8 Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
-

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Tidak meratanya pemahaman atas MBKM pada perguruan tinggi karena belum mengoptimalkan sub-sistem perguruan tinggi sehingga “jarak dan jangkauan” informasi yang terpusat tidak sampai secara terstruktur dan institusional;
- 2 Wilayah Indonesia yang luas dengan keragaman yang ada belum dilihat sebagai suatu kondisi yang tidak homogen sehingga implementasi tidak dapat “*one size fits all*” dan masing-masing wilayah memiliki tantangan yang berbeda; dan
- 3 Wilayah Indonesia memiliki beragam potensi yang belum dioptimalisasi dan dapat menjadi arah pengembangan MBKM sehingga kontribusinya akan jelas dan terukur bukan hanya pada internal pendidikan tinggi, namun juga pada *stakeholder* eksternal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Perguruan tinggi mengkaji ulang relevansi kurikulum dengan perkembangan situasi dan kondisi baik lokal, regional, nasional maupun global;
- 2 Perguruan tinggi menyiapkan infrastruktur internal (kurikulum, SDM, infrastruktur IT, dan yang diperlukan lainnya); dan
- 3 Implementasi MBKM memperhatikan situasi dan kondisi perguruan tinggi.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Ringkasan Kinerja



	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	69	81,02	117,42%
Indeks pembangunan kebudayaan	59,71	51,90	86,92%



Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan ditandai dengan meningkatnya Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia merupakan indikator yang baru mulai diukur pada tahun 2022 ini, dengan nilai indeks pada posisi 81,02 poin. Sementara itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun belakangan ini dengan nilai indeks sebesar 51,90, turun dari tahun 2021 dengan nilai indeks 54,65. Hal ini diakibatkan masih sangat terbatasnya even kebudayaan yang diselenggarakan pascapandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut adalah melalui penerbitan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan intervensi yang dilakukan mengacu pada dimensi-dimensi yang tercantum dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut.

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 2 IKSS, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

IKSS 3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

Nilai yang menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik pengujian dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Standar kemahiran berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

2022	Akhir Periode Renstra
Target 69	Target 81
Realisasi 81,02	
Capaian 117,42%	Capaian 100,02%

Capaian target Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2022 sebesar 81,02 poin, lebih dari target yang ditetapkan yaitu 69 poin atau realisasi capaian sebesar 117,42%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru mulai diukur pada tahun 2022.

Indeks ini terdiri atas rerata skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik pengujian dengan bobot yang setara, memuat unsur (1) Jumlah peserta uji, (2) Skor peserta uji, (3) Rerata skor peserta uji, (4) Skor acuan standar kemahiran berbahasa, dan (5) Jumlah karakteristik peserta uji.

Berdasarkan hasil konvensi dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016, skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, pelajar SMP diharapkan memperoleh predikat Semenjana dengan rentang skor 405 - 481. Skor acuan tertinggi berada pada angka 481.

Jumlah karakteristik pengujian mengacu pada klasifikasi pengujian berdasarkan karakteristik status dan pekerjaannya yang terbagi atas pelajar SMP/ sederajat, pelajar SMA/ sederajat, mahasiswa, guru, dosen, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan kalangan profesional.

Karakteristik Peserta	Jumlah Skor	Jumlah Peserta	Rerata Skor	Predikat	Acuan Skor Tertinggi	Indeks Skor Peuji	Karakteristik
Hakim	666	1	666,00	Unggul	640	104,06	Pejabat Struktural
Penerjemah	165.529	267	619,96	Unggul	640	96,87	Pejabat Struktural
Teknisi	930	2	465,00	Semenjana	481	96,67	



Karakteristik Peserta	Jumlah Skor	Jumlah Peserta	Rerata Skor	Predikat	Acuan Skor Tertinggi	Indeks Skor Peuji	Karakteristik
Dokter	3.035	5	607	Unggul	640	94,84	Kalangan Profesional
Pewara	1.180	2	590	Unggul	640	92,19	
Wartawan	3.449	6	574,83	Unggul	640	89,82	
Pelajar MTS	1.096.563	2.570	426,68	Semenjana	481	88,71	Kalangan Profesional
Dosen	84.104	152	553,32	Unggul	640	86,46	Guru
Sekretaris	618	1	618	Sangat Unggul	724	85,36	
Penyuluh	9.885	16	617,81	Sangat Unggul	724	85,33	Kalangan Profesional
Mahasiswa	5.107.606	9.409	542,84	Unggul	640	84,82	SMA Sederajat
ASN	777.772	1.444	538,62	Unggul	640	84,16	Kalangan Profesional
Pimpinan Lembaga	10.220	17	601,18	Sangat Unggul	724	83,04	
Pelajar SMP	37.716.851	94.775	397,96	Semenjana	481	82,74	Kalangan Profesional
Pelajar SMA	33.290.613	71.535	465,38	Madya	577	80,65	Kalangan Profesional
Editor	6.414	11	583,09	Sangat Unggul	724	80,54	Guru
Juru Bahasa	9.666	19	508,74	Unggul	640	79,49	Pejabat Struktural
Guru Honorer	51.379	102	503,72	Unggul	640	78,71	Kalangan Profesional
Guru	454.045	904	502,26	Unggul	640	78,48	Kalangan Profesional
Direktur	3.507	7	501	Unggul	640	78,28	Dosen
Pelajar SMK	10.645.699	23.709	449,02	Madya	577	77,82	Kalangan Profesional
Pelajar MA	3.265.520	7.297	447,52	Madya	577	77,56	SMA Sederajat
Pengacara	483	1	483	Unggul	640	75,47	
Pelajar MAK	2.607	6	434,50	Madya	577	75,30	SMP Sederajat
Pelajar SD	1.839.398	6.068	303,13	Marginal	404	75,03	Kalangan Profesional
Peneliti	12.836	24	534,83	Sangat Unggul	724	73,87	Pejabat Struktural

Karakteristik Peserta	Jumlah Skor	Jumlah Peserta	Rerata Skor	Predikat	Acuan Skor Tertinggi	Indeks Skor Peuji	Karakteristik
Kepala Sekolah	236.146	531	444,72	Unggul	640	69,49	SMA Sederajat
Pimpinan Eksekutif	2.191	5	438,20	Unggul	640	68,47	
Anggota TNI/Polri	824	2	412	Unggul	640	64,38	Tidak masuk
Manajer	4.863	12	405,25	Unggul	640	63,32	SMA Sederajat
Pramuwisata	345	1	345	Madya	577	59,79	
TOTAL	95.034.019		502,17			Indeks Kemahiran 81,02	

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1 Giat UKBI Adaptif Merdeka bagi Pelajar

Pelaksanaan Giat UKBI dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Balai/Kantor Bahasa. Giat UKBI ditujukan untuk siswa SMP dan SMA sederajat. Tahapan kegiatan UKBI bagi pelajar ini di antaranya melakukan diseminasi terkait UKBI Adaptif Merdeka kepada kepala sekolah/guru dan siswa, memandu pendaftaran UKBI, melaksanakan UKBI, dan melakukan evaluasi hasil UKBI kepada sekolah.

2 Layanan UKBI PNBP bagi Kalangan Profesional

Layanan UKBI PNBP bagi kalangan profesional ditujukan bagi mahasiswa, masyarakat umum, dan WNA yang membutuhkan layanan UKBI. Pelaksanaan UKBI ini termasuk layanan berbayar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kemendikbud. Tahapan layanan diawali dari peserta yang melakukan pendaftaran melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id, melakukan pembayaran, pelaksanaan UKBI, dan tahap akhir adalah mendapat sertifikat UKBI.

3 Apresiasi Giat UKBI

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memberikan apresiasi bagi sekolah yang telah melaksanakan UKBI Adaptif Merdeka bagi peserta didiknya. Sekolah yang ingin mengikuti apresiasi mengirimkan tautan YouTube video pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka dan artikel pelaksanaan UKBI di sekolahnya. Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Sebanyak 149 sekolah mendaftar untuk mengikuti



Apresiasi Giat UKBI dan 15 sekolah terbaik telah ditetapkan sebagai pemenang Apresiasi Giat UKBI.

Diseminasi UKBI bagi Pemangku Kepentingan

- 4 Kegiatan Diseminasi bagi pemangku kepentingan dilaksanakan oleh Pusat dan Balai/Kantor Bahasa. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sendiri melaksanakan diseminasi di wilayah Jawa Timur, Papua, dan Jawa Barat. Kegiatan diseminasi bagi pemangku kepentingan ditujukan kepada pemangku kepentingan seperti kepala dinas pendidikan, ketua asosiasi profesi, rektor/dekan/kaprodi, dan pimpinan/lembaga lainnya.
-

Penyusunan Instrumen UKBI

Salah satu kegiatan penting yang mendukung layanan UKBI adalah penyusunan Instrumen UKBI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun soal yang akan digunakan dalam layanan UKBI. Tahapan dalam kegiatan ini adalah

- 5
- a. Penyusunan soal;
 - b. Sidang pembakuan soal;
 - c. Uji coba soal;
 - d. Sidang validasi soal; dan
 - e. Pengunggahan soal ke bank soal.
-

Pengembangan Laman Simulasi UKBI

- 6 Laman Simulasi UKBI menjadi salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan kesiapan peserta uji dalam mengikuti UKBI. Laman tersebut akan membantu calon peserta UKBI untuk mengenali setiap proses dalam pelaksanaan UKBI mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, contoh soal lengkap sampai dengan Seksi V Berbicara, dan perolehan prediksi kemahiran berbahasa Indonesia. Laman tersebut dapat diakses melalui alamat simulasiukbi.kemdikbud.go.id.
-

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Jaringan internet di beberapa lokasi peserta uji tidak stabil dan perangkat yang digunakan untuk uji tidak standar sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan uji terganggu;
-

- 2 Pesan nirbalas UKBI yang menggunakan mailkemdikbud terkadang tidak dapat mengirimkan pesan verifikasi akun uji sehingga perlu bantuan admin untuk memverifikasi secara manual; dan
- 3 Belum optimalnya kesiapan peserta uji untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan UKBI.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Menyediakan perangkat uji berbasis luring sebagai alternatif dan melakukan pengusulan jaringan internet dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- 2 Membuat fitur pendaftaran kolektif untuk mengantisipasi kepadatan pesan nirbalas; dan
- 3 Merancang laman Simulasi UKBI untuk membantu peserta mengetahui sistem ujian dan contoh soal.

IKSS 3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah,

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 55,50	Target 57,30	Target 59,71	Target 62,70
Realisasi 55,91	Realisasi 54,65	Realisasi 51,90	Capaian 82,78%
Capaian 100,74%	Capaian 95,38%	Capaian 86,92%	

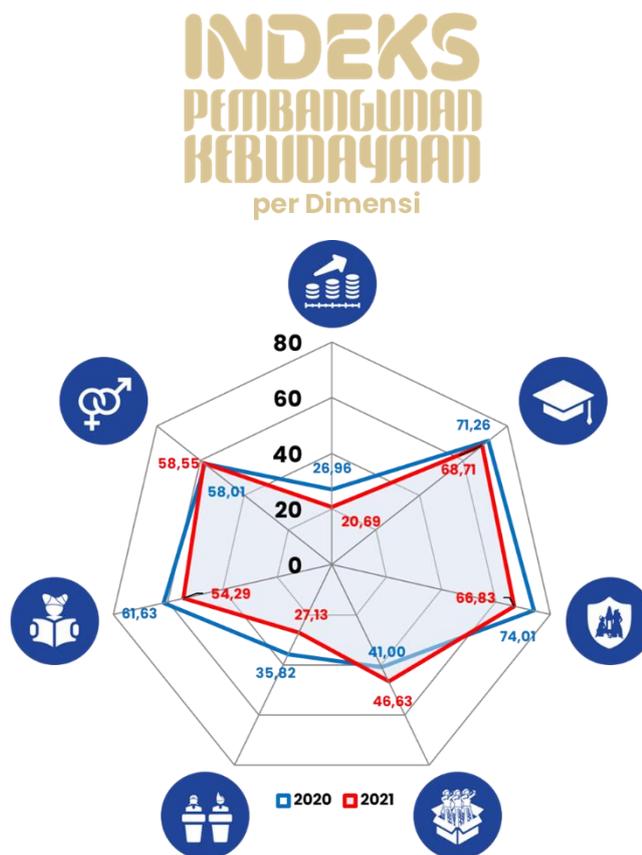
melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO, dan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni.



Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.



Capaian target IPK tahun 2022 sebesar 51,90 poin, lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 59,71 poin, atau realisasi capaian sebesar 86,92%. Data capaian tersebut berasal dari BPS menggunakan data survei ke masyarakat (metode *sampling*). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir nilai capaian target IPK terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, IPK tahun 2022 mengalami penurunan 2,75 poin dari tahun 2021. Ketidaktercapaian ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang memengaruhi menurunnya beberapa nilai dimensi.



Sebagaimana terlihat pada grafik, terjadi penurunan nilai pada dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, dan Budaya Literasi. Sebaliknya terdapat peningkatan pada dimensi Warisan Budaya dan dimensi Gender.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, diharapkan intervensi yang dilakukan untuk mengoptimalkan IPK dapat semakin terarah dan berkualitas.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Even prioritas bidang kebudayaan;
- 2 Fasilitasi dan pembinaan masyarakat dan lembaga bidang kebudayaan;
- 3 Pengembangan dan pemanfaatan even film dan musik;
- 4 Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya;

-
- 5 Desa pemajuan kebudayaan;

 - 6 Pengelolaan koleksi dan apresiasi museum dan cagar budaya;

 - 7 Dana Alokasi Khusus BOP museum dan taman budaya;

 - 8 Pengelolaan dan pameran karya seni rupa dan karya budaya;

 - 9 Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; dan

 - 10 Advokasi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Banyak seniman yang tidak dapat tampil di pertunjukan/festival seni akibat penutupan ruang publik terbuka saat pandemi Covid-19;

- 2 Berdasarkan laporan jejak pandemi dari Ditjen Kebudayaan, sebanyak 99,51% pelaku budaya mengalami penurunan penghasilan; dan

- 3 Banyaknya penutupan ruang publik pada masa pandemi menyebabkan penurunan jumlah masyarakat yang mengunjungi peninggalan sejarah secara langsung.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Penyelenggaraan berbagai pertunjukan/festival seni;

- 2 Melibatkan pelaku seni dan budaya dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan; dan

- 3 Membuat program kunjungan peninggalan sejarah melalui media virtual.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan



Ringkasan Kinerja



Target



Realisasi



Capaian (%)

Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

82.500
Karya

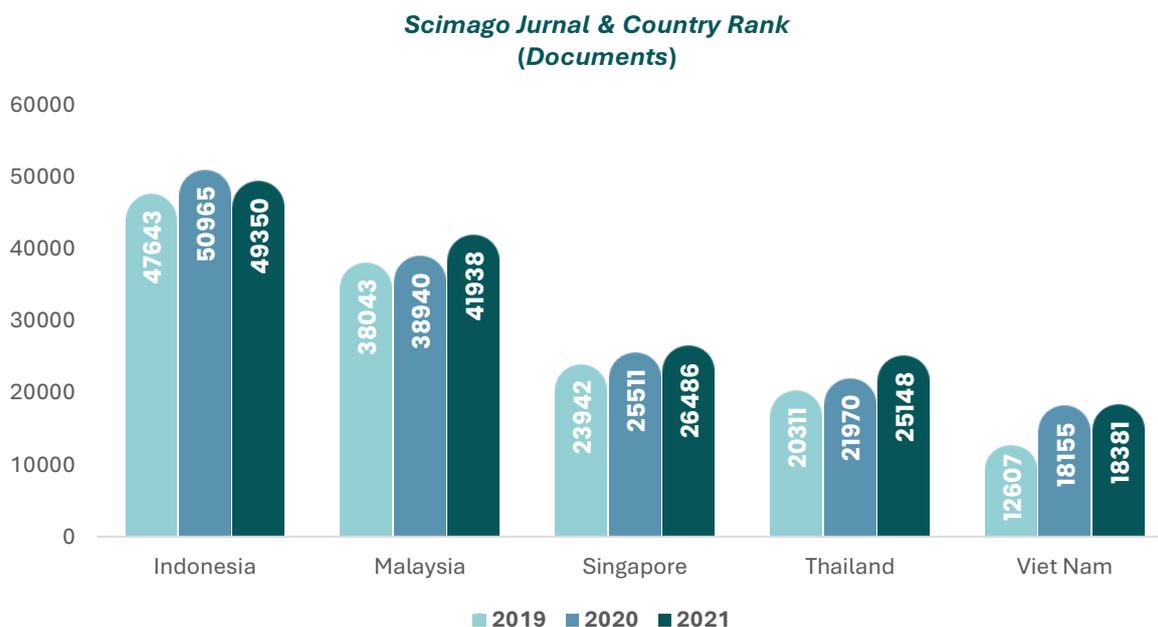
102.993
Karya

124,84%



Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan ditandai dengan meningkatnya keluaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. SS dan IKSS ini baru diterapkan pada tahun 2022 sesuai dengan penyesuaian Renstra Kemendikbudristek. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan jumlah keluaran penelitian sebanyak 102.993 karya, jauh melebihi yang ditargetkan, yakni sebesar 82.500 karya. Hal ini didukung oleh kebijakan Kemendikbudristek untuk mendorong pendidikan tinggi melakukan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat agar digunakan/diterapkan oleh masyarakat dan juga bisa mendapatkan rekognisi pada tingkat internasional.

Bila dibandingkan dengan data dokumen yang terpublikasi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada *Scimago Jurnal & Country Rank*, capaian dokumen yang terdokumentasi pada periode tersebut cukup menggembirakan, dimana setiap tahunnya Indonesia lebih produktif menghasilkan dokumen penelitian.



Sumber: Data Diolah dari <https://www.scimagojr.com/>

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 1 IKSS, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

IKSS 4.1 Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni.

Kategori luaran yang termasuk ke dalam rekognisi internasional dan penerapan di masyarakat, diantaranya yaitu:

2022	Akhir Periode Renstra
Target 82.500 Karya	Target 90.500 Karya
Realisasi 102.993 Karya	
Capaian 124,84%	Capaian 113,80%

1 Karya tulis ilmiah terdiri atas:

- a. Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik;
- b. Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
- c. Studi kasus; dan



- d. Laporan penelitian untuk mitra.
- 2** Karya terapan terdiri atas
- a. Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan
 - b. Pengembangan invensi dengan mitra.
- 3** Karya seni terdiri atas:
- a. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 - b. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 - c. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan
 - d. Karya preservasi, misalnya, modernisasi seni tari daerah.

Capaian target indikator yang mulai diukur pada tahun 2022 ini sebesar 102.993 karya, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 82.500 karya, dengan realisasi capaian sebesar 124,84%. Data capaian ini berdasarkan data seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta maupun perguruan tinggi akademik dan vokasi melalui PDDIKTI pada menu *dashboard* IKU.



Bimtek Penyusunan
Dokumen Permohonan Paten



Kegiatan Seminar Hasil Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1** Pemberian dana hibah penelitian;

- 2** Pemberian dana hibah pengabdian kepada masyarakat;

- 3** Pemberian dana bantuan prototipe;

- 4** Pelatihan penulisan artikel ilmiah;

- 5** Pemberian dana bantuan konferensi ilmiah internasional;

- 6 Pelatihan penulisan dokumen permohonan paten;
- 7 Pemberian bantuan pendaftaran permohonan paten;
- 8 Rekrutmen *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 9 Validasi luaran penelitian lanjutan;
- 10 *Workshop* jurnal menuju terindeks bereputasi;
- 11 *Workshop* peningkatan peringkat jurnal terakreditasi;
- 12 Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah (BPJI); dan
- 13 Pemberian dana insentif untuk program kekayaan intelektual dan artikel ilmiah internasional bereputasi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Keterlambatan pengesahan dokumen anggaran satuan kerja baru yang mengampu bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- 2 Keterlambatan pencairan dana penelitian;
- 3 Lambatnya proses revisi artikel dan revisi dokumen permohonan paten;
- 4 Masih terbatasnya luaran penelitian yang siap dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau didaftarkan untuk perlindungan paten;
- 5 Masih terbatasnya luaran penelitian yang siap dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;
- 6 Kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi dan/atau rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dalam jurnal bermutu;
- 7 Motivasi melakukan penelitian belum diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitiannya yang sangat berguna bagi masyarakat luas baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan teoritis; dan
- 8 Masyarakat belum mengenal produk hasil penelitian perguruan tinggi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1** Memperpanjang waktu pengumpulan laporan akhir program penelitian sehingga luaran yang dijanjikan dapat tercapai;

- 2** Melaksanakan pendampingan atau pelatihan terkait penulisan artikel ilmiah bagi dosen-dosen di perguruan tinggi, melaksanakan pelatihan penulisan permohonan dokumen paten;

- 3** Melaksanakan penyegaran *reviewer* lama serta rekrutmen *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baru untuk pembagian tugas menilai proposal, luaran penelitian dan laporan akhir;

- 4** Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten untuk meningkatkan kemampuan dosen mendapatkan perlindungan terhadap prooduk penelitian yang dihasilkan;

- 5** Melaksanakan *workshop* pembentukan Sentra KI untuk mendorong perguruan tinggi ikut aktif dalam meningkatkan produktivitas dosen menghasilkan karya ilmiah khususnya kekayaan intelektual;

- 6** Melaksanakan bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi guna meningkatkan kemampuan dosen dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi; dan

- 8** Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi, guna meningkatkan motivasi dosen untuk menghasilkan artikel ilmiah berkualitas.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel



Ringkasan Kinerja

	 Target	 Realisasi	 Capaian (%)
Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	WTP ^{*)}	100%
Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	82	85,90	104,76%
Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	BB ^{*)}	100%
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83	78,79 ^{*)}	94,93%

^{*)}Realisasi tahun 2021



Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel cukup memuaskan dengan peningkatan yang stabil. Hanya saja terdapat 3 indikator yang hasil akhirnya belum dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian PAN-RB. Peningkatan tata kelola di Kemendikbudristek ditandai oleh Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Satisfaction Survey* (SSS) yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kebijakan Kemendikbudristek untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).



Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 4 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

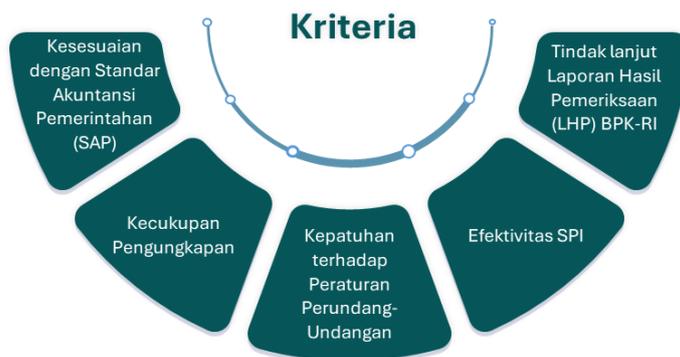
IKSS 5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan dari BPK mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemendikbudristek. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI dapat memberikan empat jenis opini:

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target WTP	Target WTP	Target WTP	Target WTP
Realisasi WTP	Realisasi WTP	Realisasi WTP*)	
Capaian 100%	Capaian 100%	Capaian 100%	Capaian 100%

- 1 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 3 Tidak Wajar (TW)
- 4 Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, kriteria yang digunakan oleh BPK dalam mengeluarkan opini adalah:



Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Predikat tersebut

9 (sembilan) x

2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

WTP

diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selama 9 tahun berturut-turut, Kemendikbudristek berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek untuk tahun 2022 belum diketahui tingkat capaiannya, karena masih menunggu laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari BPK yang biasanya diumumkan pada bulan Mei tahun berikutnya.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Melakukan penyusunan laporan keuangan Kemendikbudristek sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dilakukan secara periodik (tahunan, *audited*, semester, dan triwulan), konsisten, dan berkelanjutan;
- 2 Melakukan koordinasi, pendampingan, dan pembinaan terkait pelaksanaan sistem akuntansi laporan keuangan pada satuan kerja di Kemendikbudristek;
- 3 Melakukan pengendalian mutu internal atas pelaporan keuangan secara berjenjang;
- 4 Melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas serta *refreshment* kepada tim SAI Kemendikbudristek dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek;
- 5 Melakukan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI kepada seluruh satuan kerja terkait serta melakukan pengawasan terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut;
- 6 Melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada seluruh satuan kerja untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berjenjang dan berkesinambungan serta berkelanjutan; dan
- 7 Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), memantau progres penyelesaian serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Kemendikbudristek.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat satuan kerja yang belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangannya (CaLK) dengan baik;
- 2 Perubahan sistem pengelolaan data laporan, yang menyebabkan beberapa satuan kerja harus melakukan pembaharuan data BMN;
- 3 Proses pengelolaan PNPB belum dikelola dengan secara optimal;
- 4 Dokumen hasil tindak lanjut yang disampaikan oleh satuan kerja, belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI;



- 5 Masih terdapat satuan kerja yang belum memahami perubahan terkait reformulasi IKPA yang mulai diimplementasikan pada TA 2022; dan
- 6 Belum optimalnya satuan kerja dalam mengungkapkan seluruh permasalahan terkait dengan BMN dalam Catatan atas Laporan (CaLBMN) dan DIM.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan telaah dan pemantauan data laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI dan Mon SAKTI;
- 2 Melakukan pendampingan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di Kemendikbudristek;
- 3 Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran di Kemendikbudristek secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan;
- 4 Mengoptimalkan pelaksanaan PIPK pada jenjang UAPPA Eselon I;
- 5 Melaksanakan anggaran secara akuntabel serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- 6 Melakukan pembinaan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan satuan kerja dan unit utama dalam rangka penyusunan DIM BMN untuk kebutuhan peningkatan kualitas laporan BMN; dan
- 7 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang menangani penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, baik pada tingkat satuan kerja, Eselon I, maupun APIP.

IKSS 5.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah melalui survei dari kepuasan pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 81	Target 82	Target 82	Target 84
Realisasi 82,30	Realisasi 84,60	Realisasi 85,90	
Capaian 101,60%	Capaian 103,17%	Capaian 104,76%	Capaian 102,26%

nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai:

- 1 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan;
- 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan; dan
- 3 Indeks Kepuasan Layanan ULT.

Capaian tahun 2022 indikator kinerja ini adalah sebesar 85,90 poin, atau realisasi capaian sebesar 104,76%. Peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek terjadi di seluruh bidang, baik di bidang pendidikan, kebudayaan, maupun layanan Unit Layanan Terpadu. Bila dibandingkan capaian dengan



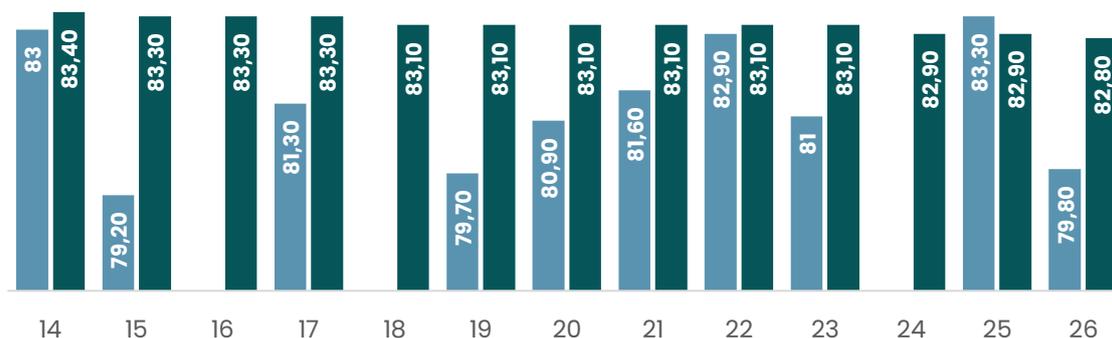
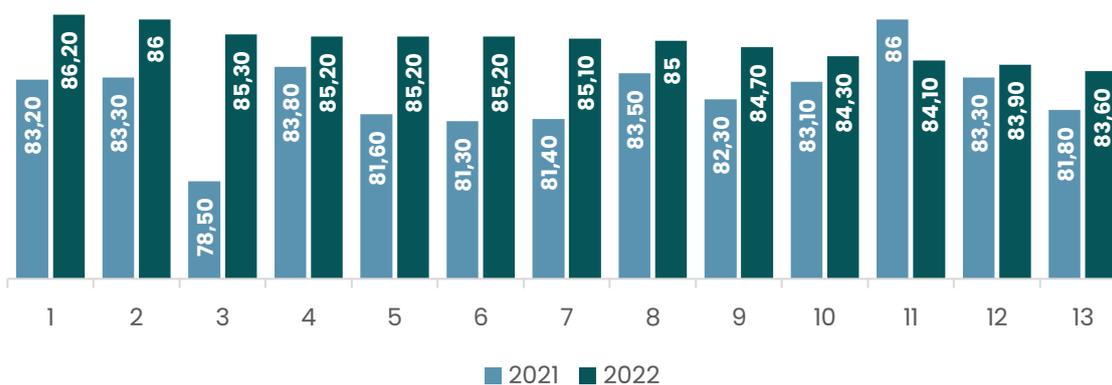
tahun 2021 sebesar 84,60 poin, indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,3 poin. Kenaikan indeks terutama didorong oleh oleh kenaikan indeks pada layanan Unit Layanan Terpadu dari 90,1 menjadi 91,9 (naik 1,8 poin). Hal ini menunjukkan bahwa layanan Unit Layanan Terpadu yang diselenggarakan secara daring oleh Kemendikbudristek sama baiknya dengan layanan secara luring atau tatap muka langsung. Indeks kepuasan bidang pendidikan mengalami kenaikan dari 81,7 menjadi 82,4 (naik 0,7 poin) dan indeks kepuasan bidang kebudayaan juga mengalami kenaikan dari 82,1 menjadi 83,5 (naik 1,4 poin).

A. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1 Guru Belajar dan Berbagi; | 10 KBBI daring/ <i>online</i> Edisi 5; |
| 2 Beasiswa Unggulan; | 11 Registrasi Dosen; |
| 3 BIPA; | 12 Sertifikasi Dosen; |
| 4 Penyuluh Bahasa Indonesia; | 13 Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi; |
| 5 SPADA; | 14 Sertifikasi Tenaga Pendidik; |
| 6 <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Guru SMK; | 15 Laman Rumah Belajar; |
| 7 Guru Penggerak; | 16 <i>Platform</i> Merdeka Mengajar; |
| 8 Afirmasi Pendidikan Tinggi; | 17 Asesmen Nasional; |
| 9 Pendidikan Kecakapan Kerja; | |

- 18** Pengangkatan ASN P3K Guru;
- 19** Afirmasi Pendidikan Menengah;
- 20** Buku Teks Pelajaran;
- 21** Pendidikan Kecakapan Wirausaha;
- 22** Dapodik;
- 23** Kanal Media Cerdas Berkarakter;
- 24** Penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- 25** Layanan Kompetensi;
- 26** UKBI;
- 27** BOS/BOP;
- 28** PIP;
- 29** PPDB;
- 30** Peningkatan Kompetensi SDM LKP Berstandar Industri;
- 31** Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 32** Penilaian Angka Kredit Dosen;
- 33** SNMPTN/SBMPTN;
- 34** Profil Pelajar Pancasila;
- 35** Aneka Tunjangan non-PNS;
- 36** Kurikulum;
- 37** Kampus Merdeka;
- 38** PD Dikti;
- 39** Program SMK Pusat Keunggulan;
- 40** Pembukaan Prodi;
- 41** KIP Kuliah;
- 42** SIPLah;
- 43** Pengembangan Karir/Kepangkatan Guru;
- 44** Penyetaraan Ijazah Luar Negeri;
- 45** Si Polen;
- 46** e-Layanan; dan
- 47** Penilaian buku nonteks.





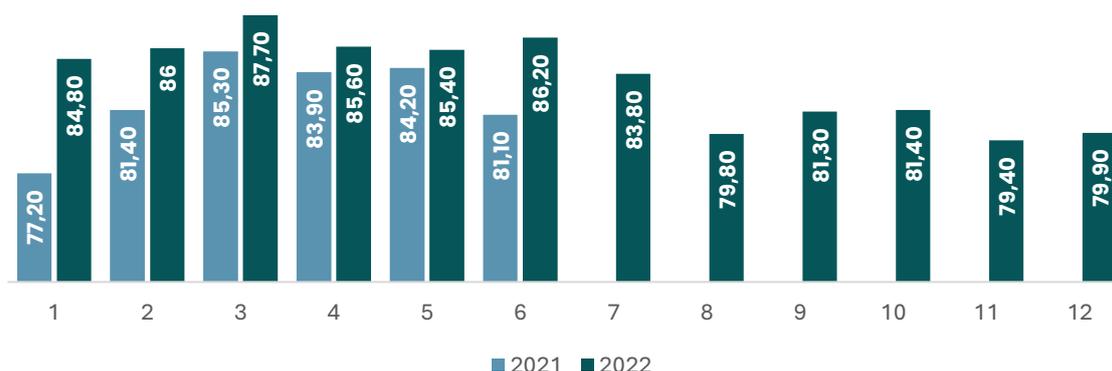
Sebagian besar parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek bidang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat beberapa parameter baru yang menjadi ukuran penilaian kepuasan *stakeholder* bidang pendidikan di tahun ini karena penambahan kebijakan terkait implementasi Merdeka Belajar yaitu, *Platform Merdeka Mengajar*, *Pengangkatan ASN PPPK Guru*, *Penyelenggaraan Uji Kompetensi*, *Peningkatan Kompetensi SDM LKP Berstandar Industri*, dan *Program SMK Pusat Keunggulan*. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan, peningkatan indeks kepuasan bidang pendidikan terjadi pada semua kategori pemangku kepentingan, kecuali kategori satuan pendidikan, mengalami penurunan, utamanya pada parameter PDDikti, Kampus Merdeka, Pembukaan Prodi, dan KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi serta untuk nonformal/informal pada parameter Kurikulum dan Peningkatan Kompetensi SDM LKP Berstandar Industri. Indeks kepuasan peserta didik sebesar 82,6 naik 0,7 poin dibanding tahun sebelumnya. Indeks kepuasan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 83,1 naik 1,4 poin dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indeks kepuasan orang tua sebesar 82,3 naik 2,5 poin dibanding tahun sebelumnya.

Secara umum, terdapat delapan parameter yang indeks kepuasannya mengalami penurunan, yaitu: *Registrasi Dosen*, *Layanan Kompetensi*, *BOS/BOP*, *Penilaian Angka Kredit Dosen*, *Aneka Tunjangan non-PNS*, *PDDikti*, *Pembukaan Prodi*, dan *KIP Kuliah*. Parameter yang turun tersebut sebagian besar berasal dari jenjang perguruan tinggi.

B. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1 Cagar Budaya dan WBTB; | 8 Kemah Budaya Kaum Muda; |
| 2 Fasilitasi Bidang Kebudayaan; | 9 Gita Bahana Nusantara; |
| 3 Bimtek Tenaga Kebudayaan; | 10 Program Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBR); |
| 4 Perizinan Perfilman; | 11 Pemajuan Kebudayaan Desa; dan |
| 5 Sertifikasi Tenaga Kebudayaan; | 12 Pendampingan Pendataan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). |
| 6 GSMS; | |
| 7 Museum Virtual; | |



Peningkatan indeks kepuasan bidang kebudayaan didorong oleh peningkatan dari seluruh parameter indeks kepuasan bidang kebudayaan. Peningkatan paling tinggi ada pada parameter Cagar Budaya dan WBTB yang naik 7,6 poin dibanding tahun sebelumnya. Indeks kepuasan menjadi sebesar 83,5 poin. Parameter bidang kebudayaan yang memiliki indeks kepuasan yang paling rendah ada pada Pemajuan Kebudayaan Desa. Indeksnya sebesar 79,4 poin.

C. Indeks Kepuasan Layanan Unit Layanan Terpadu

Parameter indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu, sebagai berikut:

- 1** Persyaratan → Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2** Prosedur → Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3** Waktu → Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
- 4** Hasil → Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

- 5 Perilaku Petugas → Sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 6 Kompetensi Petugas → Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 7 Fasilitas → Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud serta tujuan dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses;
- 8 Penanganan Keluhan → Tata cara pelaksanaan penanganan keluhan dan tindak lanjut; dan
- 9 Tarif → Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Peningkatan indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu juga didorong oleh peningkatan seluruh parameter indeks kepuasan layanan Unit Layanan Terpadu yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017. Peningkatan paling tinggi ada pada parameter hasil. Survei layanan Unit Layanan Terpadu tahun ini hanya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu diukur melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder Satisfaction Survey/SSS*), bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei.



Seluruh parameter layanan Unit Layanan Terpadu perlu dipertahankan karena sudah memberikan kepuasan kepada pengunjung; namun demikian, layanan Unit Layanan Terpadu tetap harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi harapan dan ekspektasi pengunjung yang terus berkembang, selain itu juga perlu beradaptasi dengan layanan secara daring.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Melakukan publikasi program-program yang dilaksanakan Kemendikbudristek pada berbagai media baik melalui media cetak, daring, elektronik, dan portal kemendikbudristek serta media sosial;
- 2 Fasilitasi hubungan antarlembaga baik lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan media serta melakukan fasilitasi kerja sama baik dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri termasuk kegiatan komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU);
- 3 Memperbaharui maklumat pelayanan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretariat Jenderal nomor 29/M/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Sekretariat Jenderal per 5 Agustus 2022;
- 4 Peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan, kemampuan respon dan peningkatan budaya pelayanan publik;
- 5 Melakukan penataan, pembersihan, dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas demi kelancaran pemberian informasi, konsultasi, pengaduan, dan layanan secara daring melalui aplikasi Zoom;
- 6 Melaksanakan fasilitasi pertemuan internasional serta dukungan program pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri; dan
- 7 Melakukan evaluasi tingkat kepuasan layanan kepada pemangku kepentingan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Belum optimalnya sinergi dan koordinasi publikasi dan layanan dengan unit utama dan satuan kerja terkait di Kemendikbudristek; dan
- 2 Belum optimalnya kecepatan petugas layanan dalam merespon pengaduan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit utama dan satuan kerja terkait;
- 2 Pelatihan dan Pembekalan Petugas Layanan Terpadu; dan

- 3 Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam membantu pelayanan publik.

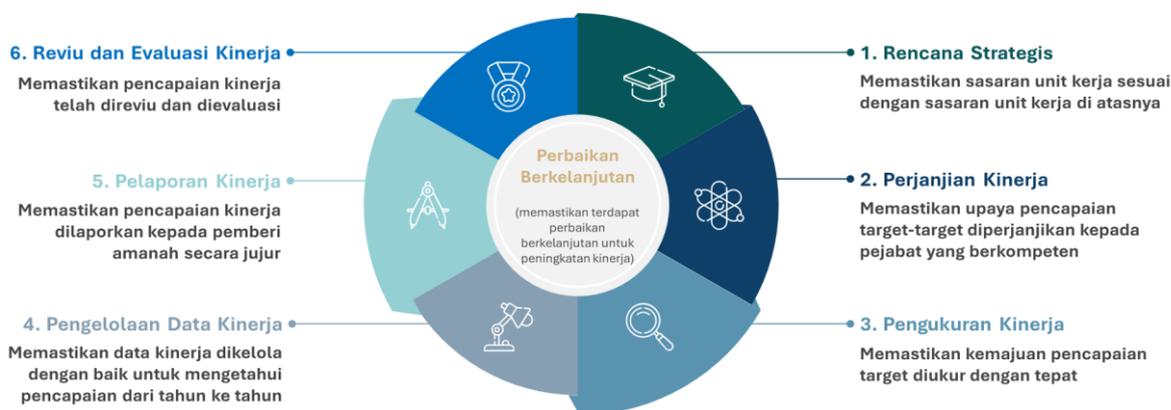
IKSS 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu area perubahan pada reformasi birokrasi. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan satuan kerja (Unit Kerja Mandiri). Penerapan akuntabilitas kinerja dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target BB	Target BB	Target BB	Target A
Realisasi BB	Realisasi BB	Realisasi BB*)	
Capaian 100,00%	Capaian 100,00%	Capaian 100,00%	Capaian 96,54%

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh KemenPAN-RB. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.



Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 difokuskan pada perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Komponen evaluasi AKIP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang kesemuanya diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.



Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interprestasi
> 90-100	AA	Sangat Memuaskan
> 80-90	A	Memuaskan
> 70-80	BB	Sangat Baik
> 60-70	B	Baik
> 50-60	CC	Cukup (Memadai)
> 30-50	C	Kurang
> 0-30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2022 target kinerja dari indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbudristek adalah BB, dan realisasinya masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Hasil capaian predikat/skor SAKIP masih menggunakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021. Pada tahun 2021 nilai SAKIP Kemendikbudristek adalah sebesar 78,92 dengan predikat BB, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 77,24 dengan predikat BB, maka pada tahun 2021 nilai predikat SAKIP Kemendikbudristek mengalami peningkatan sebesar 1,68 poin dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP secara nasional pada kementerian/lembaga di tahun 2021 sebesar 71,30, nilai SAKIP Kemendikbudristek sudah jauh di atas rata-rata nasional.



Predikat BB memiliki interprestasi Sangat Baik dan menunjukkan telah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis

teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon III/koordinator (berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan SAKIP ke seluruh satuan kerja di Kemendikbudristek;
- 2 Melakukan kegiatan berbagi praktik baik dengan K/L yang predikat SAKIP-nya sudah baik, untuk dapat mengimplementasikan ke seluruh satuan kerja di Kemendikbudristek;
- 3 Mengembangkan, melaksanakan, dan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA dalam penyelenggaraan SAKIP;
- 4 Melakukan sosialisasi dan pendampingan evaluasi AKIP mandiri ke seluruh satuan kerja di Kemendikbudristek;
- 5 Melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas perjanjian kinerja Mendikbudristek;
- 6 Melakukan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya; dan
- 7 Meningkatkan kualitas SDM SAKIP melalui pelatihan peningkatan kompetensi dengan berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat satuan kerja yang belum memahami perubahan mekanisme evaluasi, hal ini berkaitan dengan lembar kerja evaluasi baru sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021;
- 2 Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam pengimplementasian SAKIP;
- 3 Belum optimalnya tingkat pemahaman dan komitmen terhadap penyelenggaraan SAKIP di beberapa satuan kerja;
- 4 Belum optimalnya pengembangan sistem informasi manajemen kinerja (Aplikasi SPASIKITA) sehingga proses pelaksanaan evaluasi mandiri dan reviu hasil evaluasi mandiri membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih lama; dan

- 5 Kesiapan evaluator beradaptasi dengan pedoman dan sistem evaluasi AKIP terbaru belum optimal, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil reuiu.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Melakukan pengembangan dan pengujian secara berkelanjutan pada sistem informasi manajemen kinerja (aplikasi SPASIKITA) agar dapat mempermudah pengguna serta menyederhanakan proses kerja penyelenggaraan SAKIP;
- 2 Melakukan koordinasi secara intensif dengan KemenPAN-RB untuk meningkatkan proses implementasi SAKIP serta melakukan *benchmarking* dengan K/L lainnya yang predikat SAKIP-nya sudah baik;
- 3 Melakukan koordinasi, pendampingan dan pembinaan serta sosialisasi penguatan implementasi SAKIP di Kemendikbudristek;
- 4 Melakukan pendampingan pada pelaksanaan evaluasi mandiri serta reuiu evaluasi mandiri baik kepada satuan kerja maupun kepada evaluator terutama terkait penggunaan sistem baru (aplikasi) evaluasi AKIP; dan
- 5 Menyampaikan hasil analisis pengukuran kinerja kepada seluruh satuan kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di pengukuran berikutnya.

IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Indeks Reformasi Birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

2020	2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 78	Target 81	Target 83	Target 87
Realisasi 77,95	Realisasi 78,79	Realisasi 78,79*)	
Capaian 99,94%	Capaian 97,27%	Capaian 94,93%	Capaian 90,56%

Penilaian terkait Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan sidang pleno antara Ombudsman, KPK dan KemenPAN-RB. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat implementasi reformasi birokrasi terkait 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan,

penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Metode penghitungan indikator kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	Aspek Pemenuhan	20%	Manajemen Perubahan (2%); Deregulasi Kebijakan (2%); Penataan Organisasi (3%); Penataan Tatalaksana (2,5%); Penguatan Akuntabilitas (2,5%); Penguatan Pengawasan (2,5%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	Aspek Hasil Antara	10%	Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); Kualitas Pengelolaan Aset (1%); <i>Merit System</i> (1%); ASN Profesional (1%); Kualitas Perencanaan (1%); Maturnitas SPIP (1%); Kapabilitas APIP (1%); dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
	Aspek Reform	30%	Manajemen Perubahan (3%); Deregulasi Kebijakan (3%); Penataan Organisasi (4,5%); Penataan Tatalaksana (3,75%); Penataan Manajemen SDM (4,5%); Penguatan Akuntabilitas (3,75%); Penguatan Pengawasan (3,75%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
2	Hasil	40%	
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	Opini BPK (3%); Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).
	Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%).
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	Kinerja Organisasi	10%	Capaian Kinerja (5%); Kinerja Lainnya (2%); dan Survei Internal Organisasi (3%).

Pada tahun 2022 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek adalah 83, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek masih menggunakan hasil capaian tahun 2021, sehingga realisasi sebesar 78,79 poin serta capaian sebesar 94,93%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi secara nasional pada kementerian/lembaga di tahun 2021 sebesar 75,65, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek sudah melebihi capaian rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung oleh semakin banyaknya satuan kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Pada tahun 2022, dari 15 satuan kerja di Kemendikbudristek yang diusulkan untuk mendapat predikat ZI-WBK/WBBM kepada KemenPAN-RB, terdapat tiga satuan kerja yang ditetapkan sebagai ZI-WBK, yakni Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Bali, dan Fakultas Keperawatan – Universitas Sumatera Utara.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

Fasilitasi RBI

- a. Pembentukan tim RBI dan Agen Perubahan;
- b. Fasilitasi pelatihan Agen Perubahan dan Asesor;
- c. Penyusunan rencana tindak lanjut 8 area perubahan sesuai LHE;
- d. Pendampingan unit kerja calon ZI-WBK/WBBM;
- 1** e. Fasilitasi berbagai pengalaman satuan kerja pendamping kepada unit kerja calon ZI-WBK/WBBM;
- f. Pengisian LKE PMPRB Pusat 8 area perubahan, 9 unit utama, dan LKE PMPZI 179 satuan kerja;
- g. Forum Agen Perubahan; dan
- h. Pemberian penghargaan kepada satuan kerja berpredikat ZI-WBK.

Evaluasi RBI

- 2** a. Monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi Agen Perubahan;
- b. Fasilitasi evaluasi pelaksanaan RBI Kemendikbudristek dan unit utama;
- c. Fasilitasi evaluasi ZI-WBK/WBBM;

-
- d. Pelaksanaan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat (IPKP) terhadap pelayanan publik; dan
 - e. Fasilitasi survei penilaian integritas.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1 Belum terdapat *reward* untuk Agen Perubahan;
- 2 Aksi perubahan belum berdampak langsung terhadap pengguna layanan secara keseluruhan; dan
- 3 Belum optimalnya pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1 Telah disusun bersama seluruh unit utama beberapa alternatif penghargaan untuk Agen Perubahan;
- 2 Telah disampaikan oleh Menteri dalam forum Agen Perubahan yang dihadiri oleh seluruh unit utama bahwa aksi perubahan harus didesain sesuai kebutuhan pengguna layanan; dan
- 3 Melakukan koordinasi dengan LAN untuk mengupayakan peningkatan IKK yang memerlukan eviden kajian kebijakan.

D. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

Rp84.924.104.680.000



Realisasi Anggaran

Rp81.151.480.775.799

Sisa Anggaran

Rp3.772.623.904.201

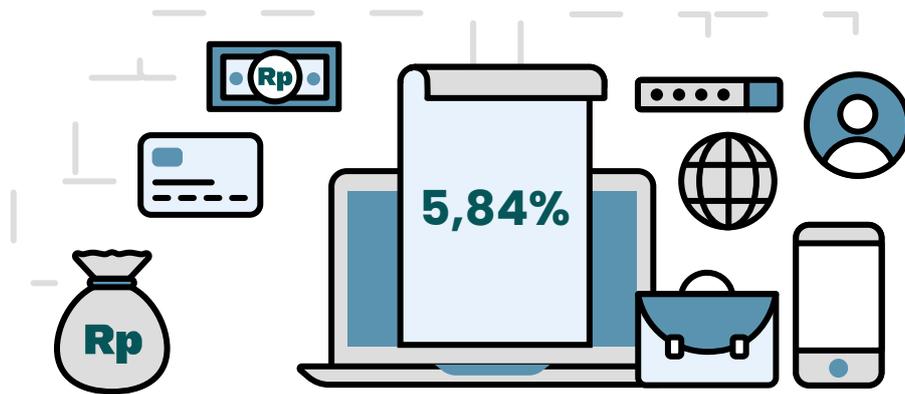
95,56%

Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 SS dengan 20 IKSS yang terdistribusi ke 9 Unit Eselon I.

	 Pagu	 Realisasi	 %
Sekretariat Jenderal	Rp33.153.300.375.000	Rp32.715.508.734.711	98,68%
Inspektorat Jenderal	Rp174.774.879.000	Rp172.290.403.896	98,58%
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp3.520.345.150.000	Rp3.493.659.574.970	99,24%
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Rp637.867.846.000	Rp626.680.535.128	98,25%
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp517.468.963.000	Rp506.761.238.535	97,93%
Direktorat Jenderal Kebudayaan	Rp1.619.268.896.000	Rp1.597.760.980.487	98,67%
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp3.371.904.398.000	Rp3.212.677.386.009	95,28%
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi	Rp35.007.345.046.000	Rp32.142.051.954.757	91,82%
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Rp6.921.829.127.000	Rp6.684.089.967.306	96,57%

Sumber Data: Laporan Kinerja Unit Eselon I, 2022

E. Efisiensi Anggaran



Pada tahun 2022, Kemendikbudristek melakukan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sebesar **5,84%** atau **Rp4.958.033.425.000,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp84.924.104.680.000,-** dengan rata-rata capaian IKSS sebesar **112,97%** dari **20 IKSS**. Efisiensi tersebut diperoleh dari:

- 1 Tunjangan Kinerja yang melekat pada gaji ke-13 dan THR;
- 2 Optimalisasi perjalanan dinas dan paket *meeting*, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya; dan
- 3 Penghematan belanja honorarium dan belanja bantuan sosial.

Refocussing anggaran dilakukan juga dengan tujuan memindahkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

- 1 Digitalisasi Pendidikan (*Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur*);
- 2 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengangkatan Guru Honorer menjadi PPPK;
- 3 Meningkatkan Literasi melalui distribusi buku ke satuan Pendidikan;
- 4 Peningkatan pelaksanaan Akreditasi dan Asesmen Nasional (AN);
- 5 Program pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; dan
- 6 Instruksi Menteri Keuangan terkait realokasi Anggaran *Automatic Adjustment*.

F. Inovasi

Kurikulum Merdeka

Dukungan penerapan Kurikulum Merdeka kepada seluruh pemangku kepentingan

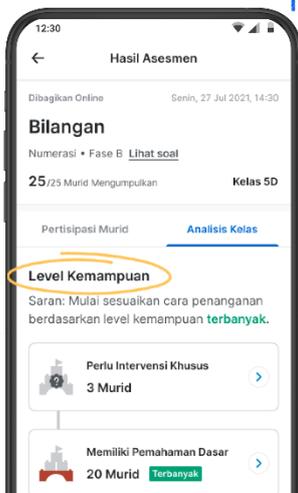


Platform Merdeka Mengajar

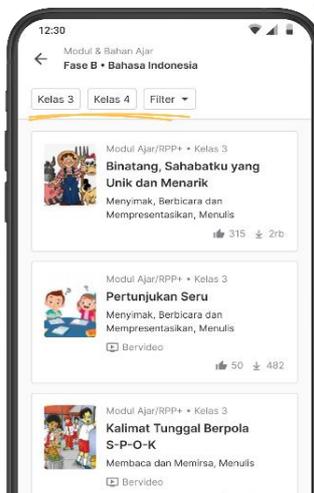
Platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk Guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila



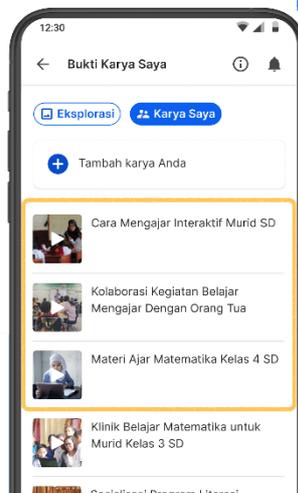
Dapatkan analisis **level kemampuan** untuk pahami kebutuhan murid



Berbagai referensi **perangkat ajar** yang bisa diunduh



Kelola **rekam jejak** dan bangun portofolio

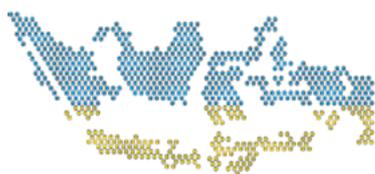


Kemendikbudristek Bekerja Sama dengan GovTech Edu - PT Telkom Indonesia dalam Mengembangkan Platform Merdeka Mengajar



Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Reformasi kebijakan BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan



01

Nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai karakteristik daerah



02

Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan



03

Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel



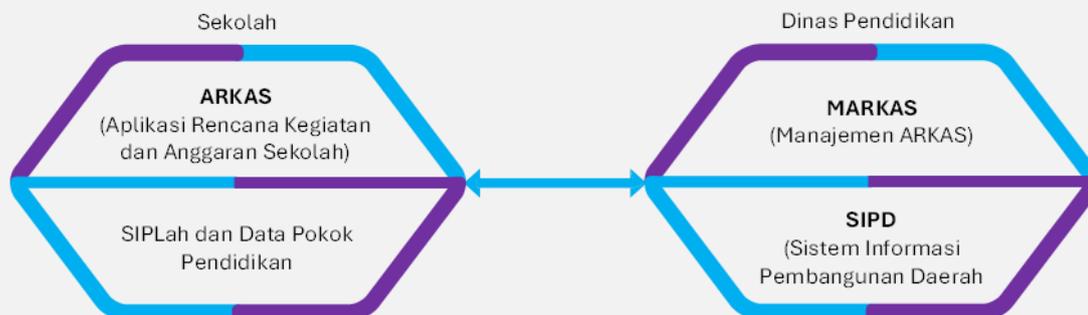
04

Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal

Integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS, dan ARKAS terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya

MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS terintegrasi dengan SIPD

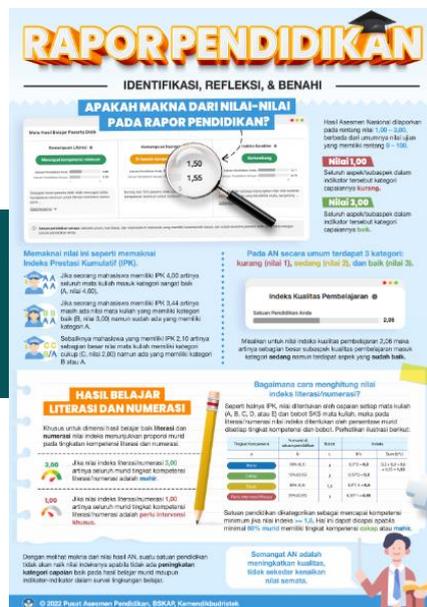
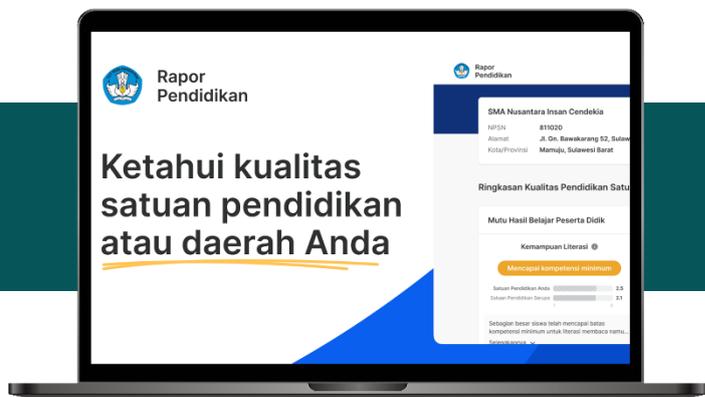


Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS



Rapor Pendidikan Indonesia

Membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan



Identifikasi, Refleksi, Benahi

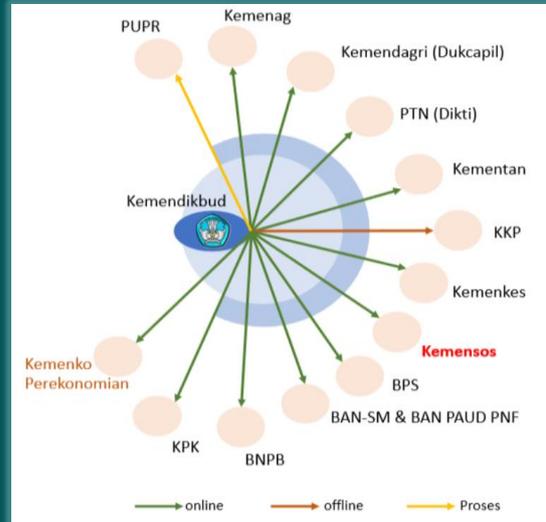


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel, terintegrasi, dan berbagi pakai

Kebijakan Nasional: Satu Data (Perpres Satu Data)

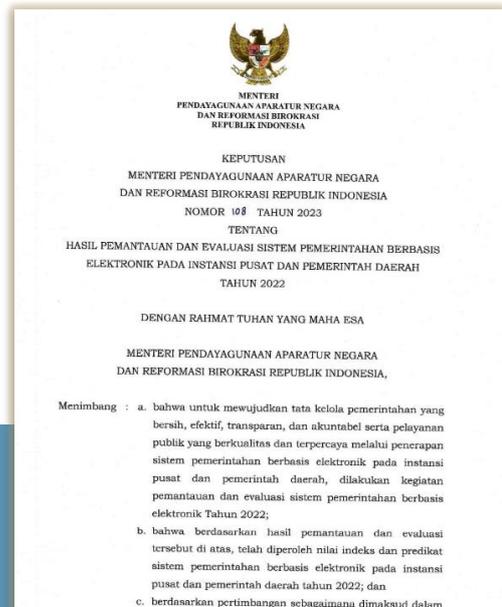
1. Integrasi dengan **Kemendikbud**: Data dan Informasi Satuan Pendidikan Keagamaan (Islam, Katolik, Kristen dan Hindu, untuk Budha belum memiliki sekolah) melalui DAPODIK, dan EMIS untuk PENDIS
2. Integrasi dengan **Kemendagri (DUKCAPIL)**: Data dan Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah
3. Integrasi dengan **PTN (Dikti)**: Program Bidikmisi dan Penerimaan Mahasiswa Baru PTN
4. Integrasi dengan **Kemantan**: SMK dibawah Kemantan dan program pembinaan dari Kemantan ke SMK yang dibawah Kemendikbud
5. Integrasi dengan **Kementerian Kelautan dan Perikanan**: Data dan Informasi sekolah dibawah pembinaan KKP
6. Integrasi dengan **Kemendes**: Data dan Informasi Satuan Pendidikan dgn Puskesmas (tahap teknis integrasi) untuk Program Sanitasi (SDGs)
7. Integrasi dengan **BPS**: Data Statistik Pendidikan bersumber dari DAPODIK untuk Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kemendikbud
8. Integrasi dengan **BAN-SM dan BAN PAUD-PNF**: Data dan Informasi
9. Integrasi dengan **PUPR**: Data dan Informasi
10. Integrasi dengan **BNPB**: Data dan Informasi Bencana
11. Integrasi dengan **KPK**: *Support* data Jaga Sekolah
12. Integrasi dengan **Kemensos**: Data penduduk miskin
13. Integrasi dengan **Kemenko Perekonomian**: Program Kartu Pra Kerja



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023

Kemendikbudristek peringkat pertama pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari KemenPAN-RB.

Indeks **3,86**
Predikat **Sangat Baik**



G. Penghargaan



Rekor MURI Pembuatan Video Wawancara Cinta Tanah Air oleh Pelajar Terbanyak



Penghargaan Kementerian Kominfo atas Sinergi Kementerian/Lembaga dengan GPR TV



Penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2022 Kategori Media Cetak Terpopuler

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022



Terbaik III Anugerah Media Humas 2022





Penghargaan dari
HUMAS INDONESIA
Silver Winner Kategori
Media Internal Sub
Kategori E-Magazine



Penghargaan dari
Sertifikat Perusahaan Pers
Silver Winner The Best of
E-Magazine Government
InMA 2022



Penghargaan dari
Komisi Informasi Pusat
Kualifikasi Informatif



Penghargaan dari
**Public Relation
Indonesia Awards**
Bronze Winner
kategori Media Cetak
& Silver Winner
kategori Media Sosial



Penghargaan dari
Tempo Ministry Award
Pengelolaan Komunikasi Terbaik
Pengelolaan Website Terbaik
Pengelolaan Medsos Terbaik



Penghargaan dari
**Pemerintah Republik
Indonesia**
Capaian Opini WTP 5x
Berturut-Turut

H. Collaborative dan Crosscutting Program

Untuk mengoptimalkan kinerja, Kemendikbudristek terus menerus melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan sehingga berdampak juga pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program *collaborative* dan *crosscutting* tersebut juga digunakan untuk memastikan sasaran menjadi terpusat dan berbasis pada prinsip ketuntasan. Dampaknya, Kemendikbudristek dapat melakukan efisiensi anggaran khususnya pada program Dukungan Manajemen melalui peningkatan program *collaborative* dan *crosscutting*. Selain itu, desain anggaran dan program kegiatan menjadi lebih baik dengan berkurangnya program dan kegiatan yang tumpang tindih antarunit Eselon I sehingga menjadi lebih efisien. Beberapa program prioritas berbasis *collaborative* dan *crosscutting* di Kemendikbudristek untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar tahun 2022, antara lain adalah sebagai berikut:

1 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Penyelarasan dan *crosscutting* program Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar fokus pada target sasaran. Target sasaran program Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan yang pelaksanaannya didukung oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Kemendikbudristek. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan bersama UPT mendampingi dan membina guru pada satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan bersama UPT juga melakukan intervensi dan advokasi kepada pemerintah daerah serta berkerja sama dengan mitra komunitas dan organisasi pendidikan untuk berkontribusi dalam pengembangan perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta UPT melakukan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan pada satuan pendidikan dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sehingga berdampak pada perubahan proses belajar yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar mampu mendorong perbaikan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Program kolaboratif ini juga memastikan pembagian peran menjadi lebih jelas, dan tidak tumpang tindih.

2 Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Untuk percepatan dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan berkualitas, lintas unit utama di Kemendikbudristek

melakukan kolaborasi untuk memastikan pendanaan tersebut tepat sasaran. Kolaborasi tersebut dalam hal pendataan peserta didik yang dilakukan oleh Pusdatin, Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama UPT melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas rencana kegiatan dan anggaran, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk proses konsolidasi ke dalam anggaran pemerintah daerah. Selain internal Kemendikbudristek, peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan juga dipetakan dan dikoordinasikan.

3 Rapor Pendidikan Indonesia

Rapor Pendidikan adalah *platform* yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. *Platform* Rapor Pendidikan berisi laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif dan analisis lintas sektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Fungsi dari Rapor Pendidikan adalah sebagai bahan refleksi dan identifikasi persoalan bagi masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan, untuk menyusun rencana perbaikan secara lebih tepat dan berbasis data. Dengan pemanfaatan data Rapor Pendidikan, maka arah kebijakan pemerintah, perintah daerah, dan satuan pendidikan, berfokus pada perbaikan kualitas layanan pendidikan sehingga lebih selaras. Dalam ruang lingkup internal Kemendikbudristek, kolaborasi antar-unit utama dilakukan khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan *platform* Rapor Pendidikan tersebut. Misalnya, BSKAP melakukan penyediaan soal-soal Asesmen Nasional, pengolahan dan analisis hasil Asesmen Nasional. Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data. Sekretariat Jenderal melalui Pusdatin melakukan penyediaan laporan-laporan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

4 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) - *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA)

Kemendikbudristek, bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, menyelenggarakan program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA). Program IISMA merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar 1 (satu) semester di kampus ternama di luar negeri sekaligus membangun jejaring dengan komunitas internasional (mahasiswa, dosen, dan masyarakat), yang pendanaannya didukung oleh LPDP. Pada lingkup internal

Kemendikbudristek, penyelenggaraan program IISMA dilakukan melalui kolaborasi dua unit utama, yaitu Ditjen Pendidikan Vokasi dan Ditjen Pendidikan Tinggi, sehingga persiapan pelaksanaan program tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

5 KEDAIREKA: Sinergi antara Perguruan Tinggi dan Mitra dalam Satu Platform

Dikembangkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Kedaireka merupakan *platform* yang mempertemukan dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja dalam mengembangkan kerja sama dan inovasi. Kedaireka merupakan solusi dalam mewujudkan kemudahan sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi mitra untuk kemajuan bangsa Indonesia, yang sejalan dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kedaireka hadir untuk membangun optimisme antara dunia kerja yang memiliki masalah dan kebutuhan, dan dapat bertemu dengan dunia pendidikan tinggi yang memiliki berbagai solusi untuk masalah tersebut. Sinergi dari berbagai pihak serta dukungan program *Matching Fund* di Kemendikbudristek sebagai insentif bersinergi pada *platform* Kedaireka ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatannya seluas-luasnya untuk masyarakat karena dapat menggabungkan semua potensi bangsa, kampus, dan industri. Pada lingkup internal Kemendikbudristek, *platform* Kedaireka tersebut dimanfaatkan bersama oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan Ditjen Pendidikan Vokasi.

6 Kolaborasi dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Kemendikbudristek, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi sebagai upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Selain itu, kolaborasi dan integrasi lintas fungsi lainnya juga dilakukan, antara lain berkolaborasi dengan AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia) untuk pembuatan 32 film animasi berdasarkan legenda dari 30 provinsi di Indonesia; berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk uji coba program Kamus Masuk Sekolah (KMS); berkolaborasi dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, untuk membentuk tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra; serta berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV) untuk pembuatan produk pemodernan sastra. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia.



7 Dana Abadi Kebudayaan (Dana Indonesiana)

Bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kemendikbudristek meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar: “Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana”. Dana Indonesiana bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pegiat budaya, baik perseorangan, komunitas, organisasi, maupun lembaga kebudayaan, dalam menciptakan karya-karya kebudayaan yang kreatif dan inovatif di Indonesia. Melalui Dana Indonesiana, pemerintah menghadirkan sistem pemanfaatan anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun. Pengalokasian anggaran Dana Indonesiana dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh LPDP. Proses kurasi, seleksi, dan kriteria seleksi dilakukan oleh para ahli di bidang kebudayaan yang dilaksanakan dan dinaungi oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan.

BAB IV

Penutup



Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja ke Depan

A. Ringkasan Kinerja

Sepanjang tahun 2022, Kemendikbudristek telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk memastikan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal, utamanya peserta didik dalam menghadapi masa pemulihan pascapandemi Covid-19. Segala upaya dilakukan untuk memastikan pembelajaran pascapandemi yang didapat oleh peserta didik berjalan secara optimal, baik melalui pembelajaran daring maupun luring, dengan memanfaatkan bahan-bahan belajar yang disediakan dan yang dapat diakses secara luas melalui *platform* digital di Kemendikbudristek. Berbagai tantangan juga dihadapi di tahun 2022, antara lain ketersediaan jaringan internet di wilayah yang sulit terjangkau, yang menyebabkan peserta didik kesulitan untuk mengoptimalkan pembelajaran daring, utamanya untuk peserta didik kelas awal; keterbatasan perangkat digital sebagai alat pembelajaran; serta keterbatasan pendidik dan tenaga pendidik berkualitas di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini juga mendorong Kemendikbudristek bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, Kinerja Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata capaian 20 IKSS Kemendikbudristek yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mendikbudristek tercapai sebesar 112,91%. Selain itu, serapan anggaran Kemendikbudristek tahun 2022 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tercapai sebesar 95,56%, dengan efisiensi sebesar 5,84%.

Capaian Kinerja

112,91%

Rata-rata dari capaian **20 IKSS** yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2022

11 IKSS

Capaian **>100%**

2 IKSS

Capaian **=100%**

7 IKSS

Capaian **<100%**

(Pagu Anggaran)

Rp84.924.104.680.000

(Realisasi Anggaran)

Rp81.151.480.775.799

Capaian Anggaran



B. Langkah Kerja ke Depan

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2022, Kemendikbudristek menetapkan langkah kerja ke depan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai berikut:

- 1 Melanjutkan dan melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi pada masa pascapandemi Covid-19, antara lain melalui implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- 2 Menyediakan bahan belajar berkualitas bagi peserta didik serta penyediaan berbagai perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan melalui *platform* digital;
- 3 Mendorong peningkatan angka partisipasi peserta didik diseluruh jenjang melalui pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, mendukung pembentukan satu PAUD satu Desa bagi wilayah yang belum memiliki PAUD, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPM PAUD dan pendidikan menengah, serta mendukung ketersediaan perguruan tinggi di wilayah terpencil sesuai dengan karakteristik daerahnya;
- 4 Penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- 5 Penguatan kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja melalui kolaborasi dalam penyusunan kurikulum, praktisi industri mengajar di kampus, kerja sama dosen dan mahasiswa dengan industri, serta program magang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau lulusan yang siap berwirausaha;
- 6 Meningkatkan budaya riset pada perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang berkualitas melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based*) dan pemecahan masalah, menyediakan bantuan riset bagi dosen, serta mendorong kolaborasi riset antara mahasiswa, dosen, industri, dan perguruan tinggi lainnya;
- 7 Mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelestarian dan penguatan budaya, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan peran bahasa Indonesia di tingkat global; dan
- 8 Perbaiki tata kelola Kemendikbudristek melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Lampiran



Pernyataan Telah Direviu
Perjanjian Kinerja 2022 (Awal)
Perjanjian Kinerja 2022 (Revisi)
Pengukuran Kinerja 2022

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 10 Februari 2023

Ketua Tim Reviu

Chatarina Muliana
197211191996032002



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Target Kinerja

#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	75.38
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.30
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	96.14
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	88.39
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31.52
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	0.51
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	47.50
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	28.30
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	27.50
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	47.84
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	5
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	42.77
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	19.70
3	[SS 3] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	69
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	59.71



4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	82500
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	82
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.061.582.460.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 10.139.195.732.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 28.646.007.592.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 705.222.791.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.003.441.979.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 11.439.457.777.000
	TOTAL	Rp. 72.994.908.331.000

Jakarta, 25 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Desember 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	75.38
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.30
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	96.14
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	88.39
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31.52
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	0.51
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	47.50
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	28.30
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	27.50
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	47.84
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	5
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	42.77
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	19.70
3	[SS 3] Meningkatnya kemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	69
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	59.71



4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	82500
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	82
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.489.599.912.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 11.660.758.958.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 36.058.885.564.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 1.238.641.749.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.885.204.697.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 12.591.013.800.000
	TOTAL	Rp. 84.924.104.680.000

Jakarta, 30 Desember 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim



Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang									
Angka Kesiapan Sekolah	75,38%	0	0	0	75,38%	0	0	0	74,34%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,30%	0	0	0	99,30%	0	0	0	99,10%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,14%	0	0	0	96,14%	0	0	0	95,92%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	88,39%	0	0	0	88,39%	0	0	0	85,49%
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,52%	0	0	0	31,52%	0	0	0	31,16%
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang									
Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,51	0	0	0	0,51	0	0	0	0,53
Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum									
a. Literasi	47,50%	0	0	0	47,50%	0	0	0	59,49%
b. Numerasi	28,30%	0	0	0	28,30%	0	0	0	45,24%
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	27,50%	0	0	0	27,50%	0	0	0	27,52%
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	47,84%	0	0	0	47,84%	0	0	0	50,95%
Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5%	0	0	0	5%	0	0	0	7,60%
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	42,77%	0	0	0	42,77%	0	0	0	45,22%
Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan	19,70%	0	0	0	19,70%	0	0	0	35,89%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)									
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan									
Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	69	0	0	0	69	0	0	0	81,02
Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71	0	0	0	59,71	0	0	0	51,90
Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan									
Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	82.500 Karya	-	-	-	82.500 Karya	-	-	-	102.993 Karya
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel									
Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP*)	WTP*)	WTP*)
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	82	0	0	0	82	0	0	0	85,90
Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	-	-	-	BB	-	-	-	BB*)
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83	0	0	0	83	0	0	0	78,79*)



LAPORAN KINERJA

Komplek Kemendikbudristek

Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

Telp.
(021) 5731177

